

SKRIPSI

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

NAMA : RENA AMELIA
NOMOR POKOK : E. 1735223035
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

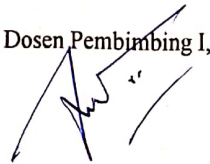
Judul Skripsi:

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

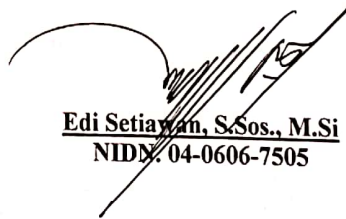
Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing I,



Dr. H. Akadun, M.Pd
NIDN. 00-3008-6401

Dosen Pembimbing II,



Edi Setiawan, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-0606-7505

Menyetujui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RENA AMELIA
NOMOR POKOK : E.1735223035
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN
SUMEDANG

Telah mempertahankan Skripsi ini dihadapan Panitia Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : Sabtu
Tanggal : 17 Juli 2021
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

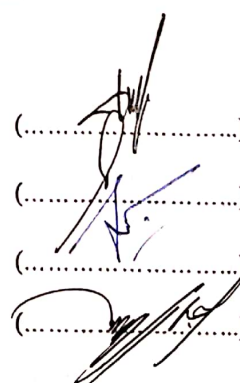
Panitia Penguji Skripsi:

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. (.....)

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Akadun, M.Pd (.....)

Pembimbing II : Edi Setiawan, S.Sos., M.Si (.....)



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG**

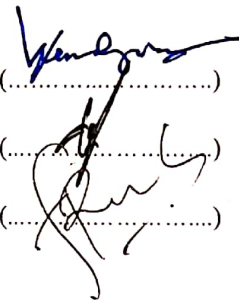
Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dan koreksi Dosen Penguji
pada Ujian Sidang Skripsi

Tim Penguji Skripsi

Penguji I : Shofwan Hendryawan, M.Pd. (.....)

Penguji II : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. (.....)

Penguji III : Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si. (.....)



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG”** ini, sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Juli 2021
Yang membuat pernyataan,

RENA AMELIA

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRAK

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh:

NAMA : RENA AMELIA
NOMOR POKOK : E. 1735223035
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

151 halaman, 5 bab, 62 tabel, 4 gambar, 12 lampiran
Daftar pustaka: 21 buku, 3 jurnal, 3 dokumen

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan Musrenbang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Untuk penyebaran angket dilakukan kepada penyelenggara dan peserta Musrenbang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang yang berjumlah 49 orang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Musrenbang di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang yaitu sebesar 84,64%. Selanjutnya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang yaitu sebesar 84,53%. Berdasarkan uji korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan sangat kuat antara Implementasi Kebijakan Musrenbang dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dengan koefisien korelasi sebesar 0,819. Adapun Pengaruh Implementasi Kebijakan Musrenbang terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang berdasarkan uji determinasi berada pada kategori kuat dengan koefisien determinasi sebesar 0,671 atau jika dipersentasekan sebesar 67,1%. Sedangkan sisanya sebesar 32,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Musrenbang, Partisipasi Masyarakat

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

ABSTRACT

**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT
PLANNING POLICY ON COMMUNITY PARTICIPATION IN THE
DEVELOPMENT PROCESS IN KECAMATAN GANEAS KABUPATEN
SUMEDANG**

Arranged by:

NAME : RENA AMELIA
MAIN NUMBER : E. 1735223035
STUDY PROGRAM : STATE ADMINISTRATIVE SCIENCE

151 pages, 5 chapters, 62 tables, 4 pictures, 12 attachments

Bibliography: 21 books, 3 journals, 3 documents

The purpose of this study was to determine the effect of Musrenbang Policy Implementation on Community Participation in the Development Process in Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. The research method used is quantitative descriptive research method with two data collection methods, namely literature study and field study. The distribution of the questionnaire was carried out to the organizers and participants of the Musrenbang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang totaling 49 people.

Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Musrenbang Policy in Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang is 84.64%. Furthermore, Community Participation in the Development Process in Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang is 84.53%. Based on the correlation test, it is known that there is a positive and very strong relationship between Musrenbang Policy Implementation and Community Participation in the Development Process in Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang with a correlation coefficient of 0.819. The influence of Musrenbang Policy Implementation on Community Participation in the Development Process in Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang based on the determination test is in the strong category with a determination coefficient of 0.671 or 67.1% if the percentage is equal. While the remaining 32.9% is influenced by other factors not examined in this study.

Keywords: Implementation of Musrenbang Policy, Community Participation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang”*.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.

Dengan segala hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan, arahan dan dorongan baik secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada:

1. Yth. Bapak Yuyun Hidayat, Drs., selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sebelas April Sumedang;
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang;
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang;
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang;
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang;
6. Yth. Bapak Dr. H. Akadun, M.Pd selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
7. Yth. Bapak Edi Setiawan, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis;
8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang;
9. Yth. Bapak Iman Kardiman, M.Si selaku Camat Kecamatan Ganeas;
10. Yth. Seluruh Pegawai Kantor Kecamatan Ganeas;

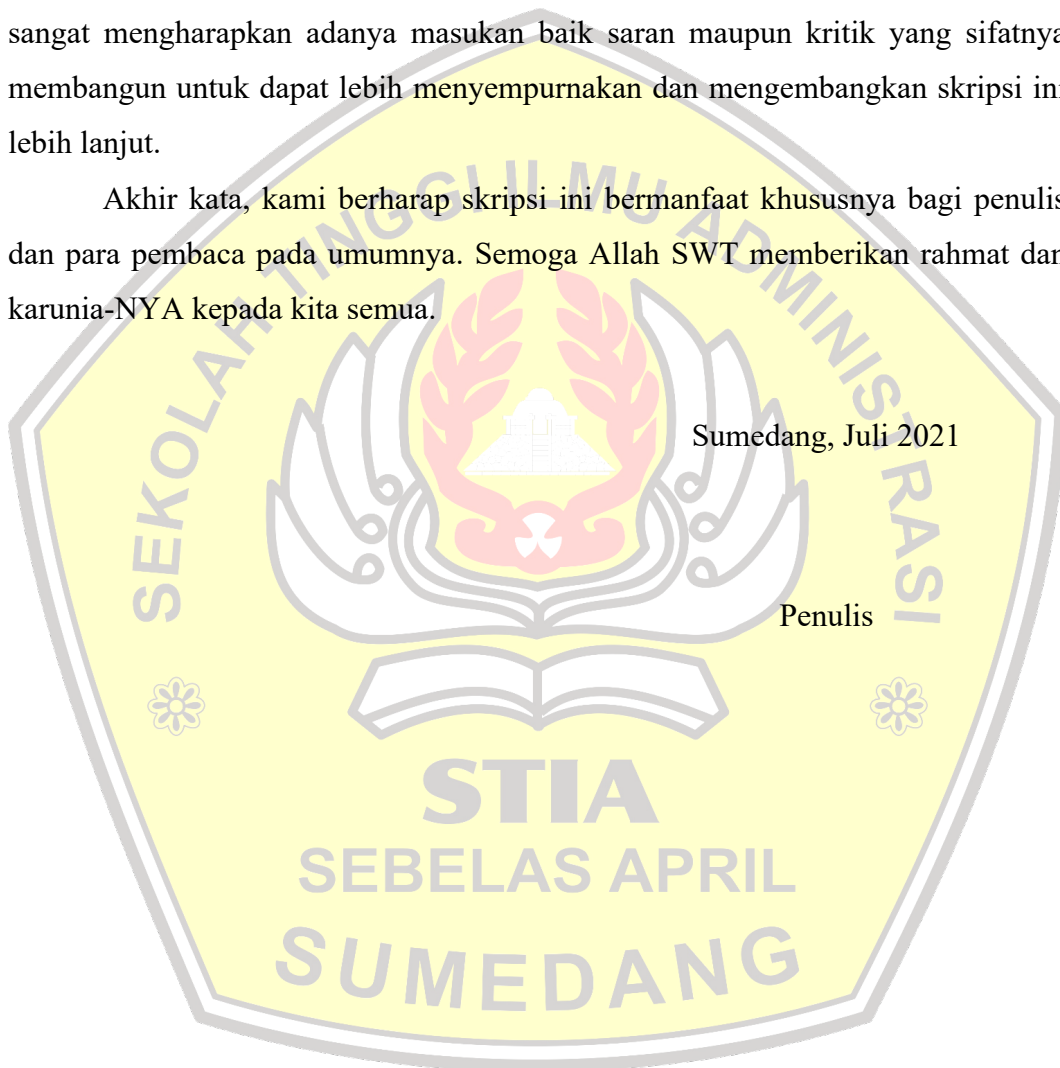
11. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan moril dan materil;
12. Rekan-rekan yang telah membantu dalam penulisan usulan penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis sangat mengharapkan adanya masukan baik saran maupun kritik yang sifatnya membangun untuk dapat lebih menyempurnakan dan mengembangkan skripsi ini lebih lanjut.

Akhir kata, kami berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua.

Sumedang, Juli 2021

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Administrasi.....	14
1. Pengertian Administrasi.....	14
2. Pembagian Ilmu Administrasi.....	15

B. Hakekat Administrasi.....	17
1. Pengertian Administrasi Negara	17
2. Ciri-ciri Administrasi Negara.....	18
C. Ruang Lingkup Administrasi Negara.....	19
1. Organisasi.....	20
a. Pengertian Organisasi	20
b. Elemen Organisasi	21
c. Karakteristik Organisasi.....	22
2. Manajemen.....	24
a. Pengertian Manajemen.....	24
b. Prinsip-prinsip Manajemen	25
c. Fungsi Manajemen.....	27
D. Kaitan Administrasi Negara dengan Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat	28
E. Kebijakan Publik.....	30
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	30
2. Komponen Kebijakan Publik	31
3. Proses Kebijakan Publik	32
4. Model Kebijakan Publik	33
F. Implementasi Kebijakan.....	34
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	34
2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan.....	36
3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan	37

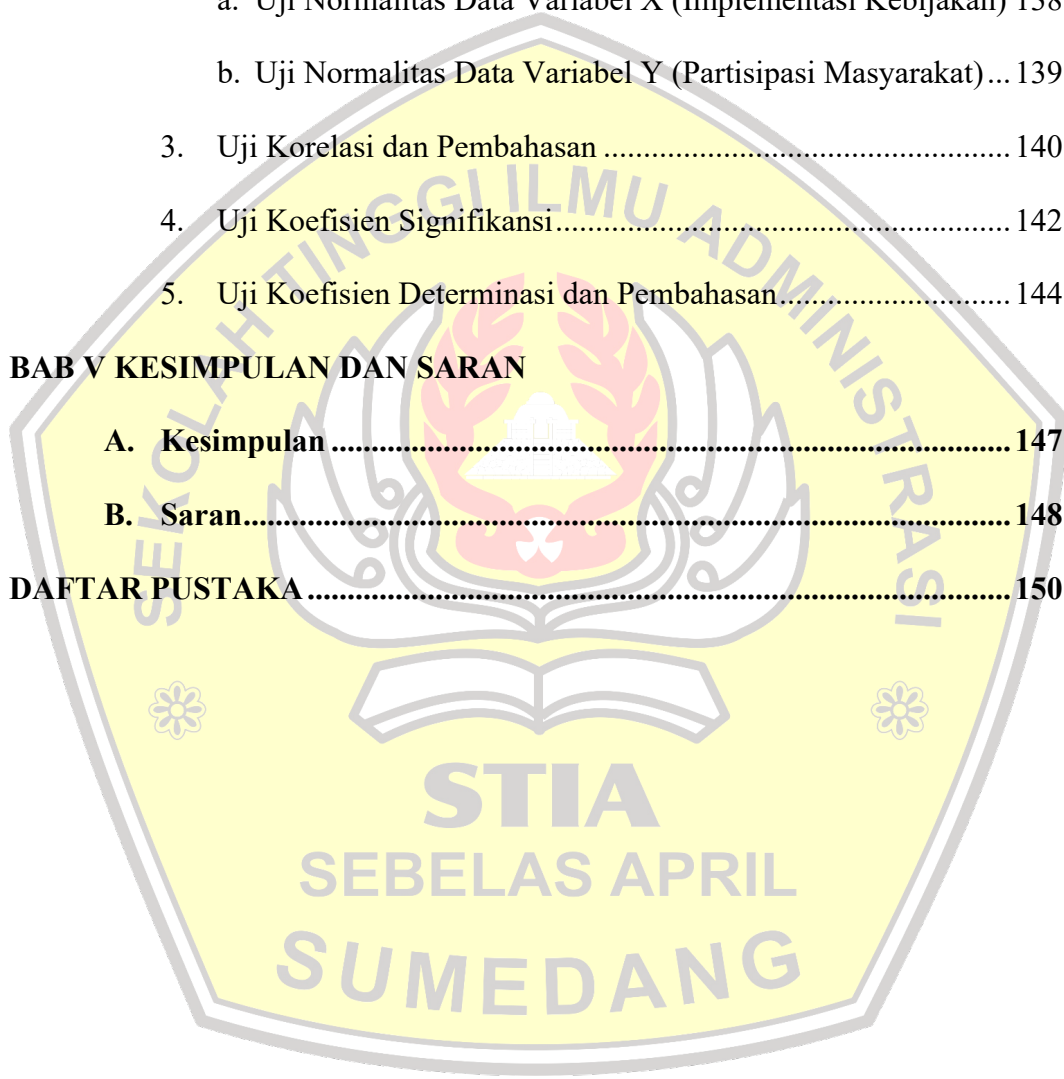
4. Model Implementasi Kebijakan	38
5. Masalah-masalah dalam Implementasi Kebijakan.....	43
G. Partisipasi Masyarakat.....	44
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	44
2. Faktor Pendorong Partisipasi	46
3. Dimensi Partisipasi.....	47
4. Bentuk atau Tahap Partisipasi.....	48
H. Kajian Penelitian Terdahulu.....	50
I. Hubungan Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat.....	54
J. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	55
1. Kerangka Pemikiran.....	55
2. Hipotesis.....	59
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	62
B. Definisi Operasional dan atau Operasionalisasi Variabel.....	63
C. Populasi, Teknik Sampling, Sampel Penelitian	66
1. Populasi Penelitian.....	66
2. Teknik Sampling.....	68
3. Sampel Penelitian.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen	71
1. Uji Validitas Instrumen.....	71

a.	Hasil Pengujian Validitas Variabel Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	72
b.	Hasil Pengujian Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat.	77
2.	Uji Reliabilitas Instrumen	82
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	83
1.	Teknik Pengolahan Data	83
2.	Teknik Analisis Data.....	84
a.	Perhitungan Prosentase	84
b.	Uji Normalitas Data	84
c.	Uji Koefisien Korelasi	85
d.	Uji Signifikansi	86
e.	Uji Koefisien Determinasi	87
G.	Lokasi dan Jadwal Penelitian	87

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang	89
1.	Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ganeas	92
a.	Tugas Pokok	92
b.	Fungsi	92
2.	Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ganeas	93
3.	Visi dan Misi Kecamatan Ganeas	96
B.	Karakteristik Responden Penelitian	98
C.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	100
1.	Perhitungan Prosentase dan Pembahasan.....	100

a. Perhitungan Prosentase Variabel X (Implementasi Kebijakan)	100
b. Perhitungan Prosentase Variabel Y (Partisipasi Masyarakat)	118
2. Uji Normalitas Data	135
a. Uji Normalitas Data Variabel X (Implementasi Kebijakan)	138
b. Uji Normalitas Data Variabel Y (Partisipasi Masyarakat)...	139
3. Uji Korelasi dan Pembahasan	140
4. Uji Koefisien Signifikansi	142
5. Uji Koefisien Determinasi dan Pembahasan	144
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	150



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	51
Tabel 3.1	Operasionalisasi Variabel X Implementasi Kebijakan.....	65
Tabel 3.2	Operasionalisasi Variabel Y Partisipasi Masyarakat	66
Tabel 3.3	Populasi Penelitian	67
Tabel 3.4	Skala Likert	70
Tabel 3.5	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Implementasi Kebijakan	72
Tabel 3.6	Analisis Item 1 Variabel Implementasi Kebijakan	74
Tabel 3.7	Hasil Validitas Implementasi Kebijakan.....	76
Tabel 3.8	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat ..	77
Tabel 3.9	Analisis Item 1 Variabel Partisipasi Masyarakat	79
Tabel 3.10	Hasil Validitas Partisipasi Masyarakat.....	81
Tabel 3.11	Jadwal Penelitian.....	88
Tabel 4.1	Penyelenggara Musrenbang	98
Tabel 4.2	Peserta Musrenbang	99
Tabel 4.3	Frekuensi Jawaban Responden Item 1	102
Tabel 4.4	Frekuensi Jawaban Responden Item 2	102
Tabel 4.5	Frekuensi Jawaban Responden Item 3	103
Tabel 4.6	Frekuensi Jawaban Responden Item 4	104
Tabel 4.7	Frekuensi Jawaban Responden Item 5	105
Tabel 4.8	Frekuensi Jawaban Responden Item 6	105
Tabel 4.9	Frekuensi Jawaban Responden Item 7	106
Tabel 4.10	Frekuensi Jawaban Responden Item 8	107

Tabel 4.11	Frekuensi Jawaban Responden Item 9	108
Tabel 4.12	Frekuensi Jawaban Responden Item 10	108
Tabel 4.13	Frekuensi Jawaban Responden Item 11	109
Tabel 4.14	Frekuensi Jawaban Responden Item 12	110
Tabel 4.15	Frekuensi Jawaban Responden Item 13	111
Tabel 4.16	Frekuensi Jawaban Responden Item 14	111
Tabel 4.17	Frekuensi Jawaban Responden Item 15	112
Tabel 4.18	Frekuensi Jawaban Responden Item 16	113
Tabel 4.19	Frekuensi Jawaban Responden Item 17	114
Tabel 4.20	Frekuensi Jawaban Responden Item 18	115
Tabel 4.21	Frekuensi Jawaban Responden Item 19	115
Tabel 4.22	Deskriptif Frekuensi Variabel Implementasi Kebijakan	116
Tabel 4.23	Frekuensi Jawaban Responden Item 1	120
Tabel 4.24	Frekuensi Jawaban Responden Item 2	121
Tabel 4.25	Frekuensi Jawaban Responden Item 3	121
Tabel 4.26	Frekuensi Jawaban Responden Item 4	122
Tabel 4.27	Frekuensi Jawaban Responden Item 5	123
Tabel 4.28	Frekuensi Jawaban Responden Item 6	123
Tabel 4.29	Frekuensi Jawaban Responden Item 7	124
Tabel 4.30	Frekuensi Jawaban Responden Item 8	125
Tabel 4.31	Frekuensi Jawaban Responden Item 9	126
Tabel 4.32	Frekuensi Jawaban Responden Item 10	126
Tabel 4.33	Frekuensi Jawaban Responden Item 11	127

Tabel 4.34	Frekuensi Jawaban Responden Item 12	128
Tabel 4.35	Frekuensi Jawaban Responden Item 13	128
Tabel 4.36	Frekuensi Jawaban Responden Item 14	129
Tabel 4.37	Frekuensi Jawaban Responden Item 15	130
Tabel 4.38	Frekuensi Jawaban Responden Item 16	130
Tabel 4.39	Frekuensi Jawaban Responden Item 17	131
Tabel 4.40	Frekuensi Jawaban Responden Item 18	132
Tabel 4.41	Frekuensi Jawaban Responden Item 19	133
Tabel 4.42	Frekuensi Jawaban Responden Item 20	133
Tabel 4.43	Deskriptif Frekuensi Partisipasi Masyarakat.....	134
Tabel 4.44	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Variabel Implementasi Kebijakan Musrenbang	138
Tabel 4.45	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Variabel Partisipasi Masyarakat	139
Tabel 4.46	Correlations Implementasi Kebijakan Musrenbang dengan Partisipasi Masyarakat	141
Tabel 4.47	Pedoman untuk Memberikan Interpretasi	141
Tabel 4.48	Uji Signifikansi	142
Tabel 4.49	Uji Koefisien Determinasi.....	144
Tabel 4.50	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi	145

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	59
Gambar 4.1	Peta Kecamatan Ganeas	90
Gambar 4.2	Data Kemiskinan Kecamatan Ganeas	91
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ganeas	94



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Observasi
- Lampiran 2 Surat Pemberian Izin Observasi dari Kecamatan Ganeas
- Lampiran 3 Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor 0032/SK/D-STIA/UN/K/I/2021 Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusunan Skripsi, Judul Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang II
- Lampiran 4 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Angket
- Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Penyebaran Angket Penelitian
- Lampiran 7 Surat Izin Penyebaran Angket Penelitian dari Kecamatan Ganeas
- Lampiran 8 Dokumentasi Penyebaran Angket
- Lampiran 9 T Tabel
- Lampiran 10 Tabel Validitas Variabel X
- Lampiran 11 Tabel Validitas Variabel Y
- Lampiran 12 Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, suku yang beragam dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun, kekayaan yang dimiliki Indonesia tersebut nyatanya belum menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Awal tahun 2020 secara mengejutkan Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Perdagangan atau *Office of the US Trade Representative (USTR)* di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), mencoret Indonesia sebagai negara berkembang yang mana artinya menurut Amerika Serikat status Indonesia saat ini sebagai negara maju. Dikeluarkannya Indonesia sebagai negara berkembang menimbulkan beragam pertanyaan, namun dari sekian banyaknya opini yang ada banyak pihak menyatakan bahwa Indonesia belum layak sebagai negara maju, salah satu aspek belum layaknya Indonesia berada dalam kategori negara maju yaitu belum meratanya pembangunan di Indonesia yang merupakan salah satu ciri atau karakteristik negara maju.

Agar benar-benar dapat lepas dari perangkap negara berkembang dan mewujudkan visi Indonesia maju, pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, salah satu bidang pembangunan yang secara masif dikerjakan oleh Pemerintah Indonesia saat ini

adalah pembangunan infrastruktur. Hal tersebut gencar dilakukan karena melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh tanah air, diyakini dapat menciptakan konektivitas yang kuat antarwilayah, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Dalam mewujudkan visi Indonesia maju melalui pembangunan, selain harus adanya strategi atau sistem perencanaan pembangunan nasional, untuk menjamin keberhasilan pembangunan juga diperlukan partisipasi dari masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Peran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diperlukan agar pembangunan yang akan dilaksanakan tepat sasaran. Pentingnya mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat merupakan tindakan yang sudah semestinya dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keberhasilan pembangunan, hal tersebut

dilakukan karena masyarakatlah yang paling memahami keadaan, potensi dan apa yang dibutuhkan daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan
Dalam perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
2. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran
Dalam penganggaran pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
Dalam melaksanakan pembangunan daerah, pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan, yaitu pemberian hibah dari masyarakat kepada pemerintah daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengevaluasian
Dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Kompleksnya peran masyarakat dalam pembangunan menuntut pemerintah untuk memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat mengeluarkan segenap aspirasinya yang nantinya akan didiskusikan bersama sehingga ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut dan terjalinnya sinergi antara pemerintah dengan masyarakat. Forum yang diperuntukkan dan diperlukan untuk

masyarakat menyampaikan segenap usulannya dalam bidang pembangunan adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa “Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah”. Dengan kata lain salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu berhasil tidaknya implementasi kebijakan Musrenbang sebagai forum pendidikan bagi para pelaku pembangunan, dimana salah satu *stakeholdernya* adalah masyarakat.

Penyelenggaraan Musrenbang dimulai dari Musrenbang tingkat dusun, Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten/Kota dan Musrenbang tingkat Provinsi. Musrenbang Desa/Kelurahan merupakan Musrenbang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dimana dalam Musrenbang Desa/Kelurahan diawali dengan penggalan gagasan ditingkat Dusun yang bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat Desa/Kelurahan. Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan akan menjadi masukan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan.

Musrenbang tingkat Kecamatan adalah forum tahunan para pemangku kepentingan ditingkat Kecamatan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat Desa/Kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas Desa/Kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

Kecamatan dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Hasil Musrenbang tingkat Kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi yakni Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, faktanya diakui oleh pihak-pihak terkait dan tercantum dalam Lakip Kecamatan Ganeas, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Ganeas masih rendah. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan salah satu penyebabnya karena adanya kecemburuan dari masyarakat, misalnya tidak diikutsertakan dalam program-program bantuan dari pemerintah sehingga mereka tidak mau memberikan kontribusinya.

Kecemburuan masyarakat bukan tanpa alasan, dimana kecemburuan ini terbentuk karena masyarakat tidak mengetahui dengan jelas suatu program pembangunan. Program pembangunan di Kecamatan Ganeas meliputi dua aspek, aspek pertama yaitu program pembangunan secara fisik seperti perbaikan atau pengaspalan jalan Kabupaten, aspek kedua yaitu pembangunan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat seperti pembinaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Mekanisme penetapan program pembangunan yang seharusnya diawali dengan penggalian aspirasi masyarakat di setiap Dusun melalui Musrenbang Dusun kemudian dibahas dalam Musrenbang Desa dan diusulkan dalam Musrenbang Kecamatan serta disepakati dalam Musrenbang Kabupaten, yang mana setelahnya diberitahukan kembali kepada masyarakat. Kenyataannya justru masih banyak masyarakat yang tidak

mengetahui mekanisme pembangunan seperti itu dan menganggap bahwa perencanaan pembangunan sepenuhnya ditetapkan oleh unsur pemerintah semata sehingga ketika terjadi ketidaksesuaian seringkali menimbulkan sikap resistensi (sikap melawan atau menentang) dari masyarakat, hal ini diakibatkan dari peran masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas yang hanya dijadikan objek atau sasaran daripada pembangunan dan tidak diikutsertakan sebagai subjek pembangunan yang harus terlibat dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam tahap perencanaan pembangunan. Padahal perencanaan pembangunan harus bersifat transparan dan partisipatif, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 3 yang menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan”.

Salah satu forum yang membahas mengenai perencanaan pembangunan yaitu forum Musrenbang. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan Musrenbang di Kecamatan Ganeas ini diawali dengan Musrenbang tingkat Dusun yang biasanya dilaksanakan pada bulan Juni, kemudian Musrenbang tingkat Desa pada bulan September dan Musrenbang Kecamatan pada bulan Februari. Dalam Musrenbang Kecamatan Ganeas dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah sebagai keterwakilan masyarakat, namun faktanya tidak semua unsur pemerintah mampu menunjukkan komitmennya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, karena diakui oleh pihak penyelenggara yaitu kecamatan dalam hal ini seksi PPM

(Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat) tidak semua peserta Musrenbang hadir dalam pelaksanaannya. Jika ditinjau dalam absensi memang semua peserta hadir, tapi realitanya diakui oleh penyelenggara yang hadir hanya sekitar 80%-85% saja. Ketimpangan antara absensi dan pelaksanaan terjadi karena masih adanya fenomena titip absen yang dilakukan oleh peserta sebagai upaya untuk memberikan laporan yang baik kepada sekretariatnya masing-masing. Dengan alasan tersebutlah pihak penyelenggara mengatakan bahwa absensi tidak bisa sepenuhnya membuktikan kehadiran peserta Musrenbang. Disamping kurangnya komitmen unsur pemerintah dalam pelaksanaan Musrenbang, faktor lainnya yang belum mampu memuaskan masyarakat yaitu karena tidak semua usulan dapat direalisasikan dikarenakan keterbatasan anggaran.

Permasalahan Musrenbang di Kecamatan Ganeas tidak berhenti hanya pada persoalan komitmen dan anggaran, hal itu dikarenakan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Ganeas juga masih abu-abu, apakah usulan tersebut betul-betul datang dari masyarakat atau terdapat kepentingan elit pemerintah, karena pada kenyataannya di Kecamatan Ganeas ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Musrenbang, baik prosesnya maupun hasilnya. Padahal menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 18 menyatakan bahwa “Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah”.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan indikasi-indikasi yang mengarah pada belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dengan gejala-gejala antara lain:

1. Masyarakat kurang memiliki kesadaran, kemampuan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Contoh: Masih ada masyarakat yang kurang tanggap terhadap proses perencanaan pembangunan karena ingin terima jadi dan kurangnya penjangkaran aspirasi masyarakat terkait pembangunan oleh unsur pemerintah bersangkutan sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan perannya dalam perencanaan pembangunan.
2. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti gotong royong untuk pembangunan dan masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam swadaya segi pendanaan karena menganggap biaya pembangunan tanggung jawab penuh pemerintah. Contoh: Dalam kegiatan gotong royong pembersihan jalan masih ada masyarakat yang bersikap acuh dengan mengabaikan himbauan tersebut. Contoh lainnya ketika terjadi kerusakan fasilitas umum dan dana pemerintah belum terealisasi masyarakat terkadang berinisiatif untuk memperbaikinya, namun dalam pelaksanaannya masih ada masyarakat yang cenderung bersikap acuh dengan tidak ikut berkontribusi didalamnya.

3. Masyarakat kurang menunjukkan rasa tanggung jawab yang penuh dalam dirinya terhadap hasil pembangunan, sehingga pembangunan yang telah dilakukan terkadang tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Contoh: Proyek pembangunan MCK, masih ada masyarakat pengguna MCK yang membiarkan MCK dalam keadaan kotor sehingga menyebabkan kerusakan. Contoh lainnya program bantuan usaha dalam rangka memberdayakan masyarakat, masih banyak masyarakat penerima bantuan yang justru menggunakan bantuan yang diterimanya tersebut untuk kepentingan yang sebenarnya tidak perlu.
4. Masih ada masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap hasil pembangunan karena merasa tidak memiliki hak terhadap pembangunan. Contoh: Ketika terjadi ketidaksesuaian dalam pembangunan, masih ada masyarakat yang cenderung bersikap pasif dengan tidak mengajukan keluhan secara formal.

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, penulis menduga bahwa hal itu disebabkan karena belum baiknya implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya sosialisasi Musrenbang secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang ikut berpartisipasi menyalurkan aspirasinya dan hanya orang-orang tertentu juga yang mengetahui hasil (tujuan dan sasaran) dari pada

Musrenbang. Contoh: orang yang dekat dengan aparaturnya, dusun, desa atau kecamatan.

2. Musrenbang belum mampu menyerap dan menindaklanjuti semua usulan dikarenakan keterbatasan anggaran. Contoh: adanya pagu anggaran atau alokasi anggaran yang ditetapkan sehingga tidak semua usulan yang diajukan oleh peserta dapat direalisasikan.
3. Fasilitas Musrenbang kurang memadai. Contoh: Proses pengajuan usulan dalam Musrenbang masih dilakukan secara manual belum menggunakan teknologi presentasi dan tempat pelaksanaan Musrenbang kurang memadai terlihat dari tempat duduk yang cukup berdekatan.
4. Sumber daya manusia yang terlibat dalam Musrenbang menunjukkan sikap yang tidak seharusnya. Contoh: Masih ada peserta Musrenbang yang tidak hadir saat pelaksanaan Musrenbang, masih terjadinya fenomena titip absen dan saat pelaksanaan Musrenbang peserta cenderung mempertahankan egoismenya karena ingin usulannya diterima sehingga membuat perdebatan terkadang memanas dan menghambat proses Musrenbang.
5. Belum adanya wadah bagi masyarakat untuk mengawasi usulan-usulan sehingga masyarakat tidak mengetahui usulan mana yang diterima dan usulan mana yang ditolak. Contoh: Belum adanya e-Musrenbang yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan usulan penelitian tentang **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI KECAMATAN GANEAS KABUPATEN SUMEDANG”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan berbagai aspek masalah yang dihadapi diatas penulis menduga implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan dipengaruhi banyak faktor yang salah satunya adalah partisipasi masyarakat yang masih rendah. Adapun rumusan masalah yang peneliti tetapkan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ?
3. Adakah hubungan implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ?
4. Adakah pengaruh implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui adakah hubungan implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui pengaruh implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah pengetahuan penulis dibidang administrasi khususnya yang berkenaan dengan implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, juga sebagai referensi tambahan bagi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi pada jurusan Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbang saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dalam memecahkan masalah yang berkenaan dengan implementasi kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa latin *administration* yang berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan. Istilah administrasi ini sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat mencatat dan surat menyurat. Hal ini dikarenakan pengertian administrasi secara sempit yang dalam bahasa Belanda *administratie* meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, pembuatan agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Sementara secara luas administrasi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan pengertian administrasi, setiap pakar atau praktisi berupaya memberikan definisi berbeda satu dengan lainnya dan berikut adalah beberapa definisi mengenai administrasi yang dikemukakan oleh para ahli.

Pendapat pertama dari Soetarto dan Soewarno (dalam Akadun, 2019: 36) yang menyatakan bahwa “administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan”.

Senada dengan pendapat pertama, Siagian (dalam Akadun, 2019: 37) menjelaskan bahwa “administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara

dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Sementara White (dalam Akadun, 2019: 37) mengatakan bahwa “administrasi adalah proses yang umumnya dijumpai di semua kegiatan-kegiatan kelompok, baik publik (negara, pemerintahan) maupun privat (swasta, perusahaan), sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil”.

Dari pendapat ketiga ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu proses kerja sama, proses penyelenggaraan dan pengurusan tindakan sekelompok manusia yang didasarkan atas rasionalitas tertentu yang umumnya dijumpai dalam setiap usaha kerjasama atau kegiatan-kegiatan kelompok baik publik (negara, pemerintahan) maupun privat (swasta, perusahaan), sipil atau militer, dalam ukuran besar atau kecil dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pembagian Ilmu Administrasi

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, para pakar dan ilmuwan administrasi sepakat melakukan pembagian ilmu administrasi. Sama halnya dengan pengertian administrasi, banyak ahli yang berbeda pendapat mengenai pembagian ilmu administrasi ini. Namun selama alasannya jelas, maka pembagian ilmu administrasi sangat sah-sah saja.

Gie (dalam Akadun, 2019: 45-47) mengemukakan bahwa berdasarkan kriteria tertentu pembagian ilmu administrasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Atas dasar faktor-faktor yang membentuk administrasi sebagai segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan-pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya yang bermaksud mencapai apapun dalam usaha bersama dari sekelompok orang meliputi:

- a) Adanya 2 (dua) orang atau lebih (sekelompok orang).
 - b) Kelompok orang itu bekerja sama (usaha kerja sama).
 - c) Tujuan tertentu yang hendak dicapai oleh sekelompok orang tersebut.
- 2) Administrasi sebagai proses kegiatan dibagi menjadi 8 (delapan) unsur yaitu:
- a) Organisasi
 - b) Manajemen
 - c) Administrasi komunikasi
 - d) Administrasi kepegawaian
 - e) Administrasi keuangan
 - f) Administrasi perbekalan
 - g) Tata usaha/Administrasi perkantoran
 - h) Hubungan masyarakat
- 3) Berdasarkan lingkungan suasana sebagai upaya berlangsungnya usaha kerja sama administrasi dibagi menjadi:
- a) Lingkungan suasana kenegaraan melahirkan Ilmu Administrasi Negara.
 - b) Lingkungan suasana perusahaan melahirkan Ilmu Administrasi Perusahaan.
 - c) Lingkungan suasana sosial melahirkan Ilmu Administrasi Sosial.

Sementara Siagian (dalam Sundarso dkk, 2014: 9) membagi administrasi ke dalam tiga cabang yaitu sebagai berikut:

- 1) Administrasi negara (*public administration*).
- 2) Administrasi privat (*business administration*).
- 3) *Public business administration* atau *public business corporation*.

Pembagian ilmu administrasi menunjukkan bahwa betapa kompleks dan luasnya kegiatan administrasi. Suatu kegiatan dinamakan administrasi manakala kegiatan tersebut memperhatikan berbagai aspek mulai dari faktor pembentuk administrasi, unsur-unsur administrasi dan lingkungan administrasi. Berkenaan dengan kegiatan administrasi yang dilakukan itu termasuk dalam administrasi negara, administrasi privat ataupun *public business administration* dapat dilihat dari tujuan kegiatan administrasi tersebut.

B. Hakekat Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi negara sering disebut sebagai administrasi publik, terjemahan dari *public administration*. Jika kata *public* diterjemahkan sebagai negara, administrasi negara akan terasa serba-dominasi kekuasaan negara. Demikian juga jika diterjemahkan sebagai masyarakat, administrasi negara akan berkonotasi pada kebebasan yang liberalistis.

Para pakar atau ahli memiliki pendapat sendiri dalam memandang administrasi negara, dan berikut adalah pandangan para ahli atau pakar mengenai administrasi negara.

Litchfield (dalam Anggara, 2018: 74) menjelaskan bahwa “administrasi negara adalah suatu studi mengenai cara bermacam-macam badan pemerintah diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan dan dipimpin”.

Selanjutnya Pfiffner (dalam Anggara, 2018: 92) berpendapat bahwa:

Public administration is the coordinating of collective efforts to implement public policy.

(Administrasi negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah).

Pendapat Pfiffner didukung oleh Caiden (dalam Anggara, 2018: 92), yang mengatakan bahwa “administrasi negara meliputi setiap bidang dan aktivitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah, termasuk proses kegiatan formal, fungsi yang berlaku di lingkungan peradilan dan kegiatan dari lembaga-lembaga militer”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara adalah studi mengenai koordinasi dari usaha-usaha kolektif dan cara badan pemerintah diorganisasikan, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakan dan dipimpin yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah yang didalamnya termasuk kegiatan formal, fungsi yang berlaku di lingkungan peradilan dan kegiatan dari lembaga-lembaga militer.

2. Ciri-ciri Administrasi Negara

Dalam banyak hal administrasi negara berbeda dan memiliki ciri-ciri khusus dibandingkan dengan swasta. Berikut ini diuraikan ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara terutama bila dibandingkan dengan swasta.

Thoha (dalam Anggara, 2018: 94), menunjukkan ciri-ciri administrasi negara yaitu:

- 1) Pelayanan bersifat lebih urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi swasta.
- 2) Pelayanan bersifat monopoli atau semi monopoli.
- 3) Pelayanan kepada masyarakat umum berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan.
- 4) Pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti organisasi perusahaan yang terkait oleh harga pasar dan untung-rugi.
- 5) Usaha-usaha dilakukan oleh administrasi negara terutama dalam negara demokrasi sangat bergantung pada penilaian mata rakyat banyak (publik).

Selanjutnya Caiden (dalam Anggara, 2018: 94-95), mengemukakan ciri-ciri administrasi negara yang sekaligus merupakan kekhususan administrasi negara yaitu:

- 1) Kehadirannya tidak bisa dihindari. Kehadiran administrasi negara lekat dengan eksistensi negara selama ada negara, administrasi negara pun akan tetap ada. Apapun yang terjadi, keinginan dan kepentingan

rakyat harus dilayani. Penyelenggaraan administrasi negara adalah penting untuk kehidupan masyarakat.

- 2) Administrasi negara mengharapkan kepatuhan; administrasi negara adalah satu-satunya yang memiliki monopoli kekuasaan memaksa.
- 3) Administrasi negara memiliki prioritas untuk mengatur pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, administrasi negara menerima pertanggungjawaban moral dengan memberikan sesuatu yang paling tepat.
- 4) Administrasi negara memiliki ukuran yang tidak terbatas. Besar lingkup kegiatan administrasi negara meliputi seluruh wilayah negara, di darat, di laut dan di udara.
- 5) Manajemen puncak administrasi negara adalah politik. Administrasi negara dipimpin oleh pejabat-pejabat politik. Hal ini berarti pimpinan tertinggi dari administrasi negara dijabat oleh pejabat yang dipilih atau diangkat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 6) Penampilan administrasi negara sulit diukur; kesulitan dalam mengukur politik administrasi negara tampaknya berasal dari kedua penyebab pokok:
 - a) adanya warna politik pada kegiatan administrasi negara;
 - b) luasnya objek kegiatan administrasi negara yang tidak terpengaruh oleh ukuran-ukuran objektif.
- 7) Lebih banyak yang diharapkan pada administrasi negara. Dalam hal ini terdapat dua standar penilaian, satu pihak masyarakat menghendaki administrasi negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada pihak lain administrasi negara memiliki kemampuan, keahlian, dana dan sumber lain yang terbatas. Masyarakat menghendaki pejabat administrasi negara berbuat melindungi kepentingan orang banyak, tidak hanya satu golongan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi negara yang bersifat *urgent*, monopoli (bersifat memaksa), berlandaskan undang-undang, tidak dikendalikan harga pasar, tidak bisa dihindari, tidak terbatas, sulit diukur dan dipimpin oleh pejabat politik dimaksudkan agar tujuan administrasi negara untuk memenuhi kebutuhan warga negara di tengah-tengah keterbatasan administrasi negara dapat terlaksana.

C. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Ruang lingkup administrasi negara menurut Henry dalam Pasolong (2013:

- 19) dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu

administrasi publik itu sendiri yang meliputi organisasi publik (berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi), manajemen publik (berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia), dan implementasi (menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi).

1. Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berdampingan dan membentuk kelompok dengan manusia yang lain. Salah satu alasan manusia selalu berkelompok adalah karena kebutuhan manusia yang semakin kompleks dari waktu ke waktu sehingga manusia membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tempat atau wadah berkumpulnya sejumlah orang yang saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya ini disebut organisasi.

Para pakar atau ahli memiliki pendapat sendiri dalam memandang organisasi, dan berikut adalah pandangan para ahli atau pakar mengenai organisasi.

Schein (dalam Muhammad, 2011: 23) mengemukakan bahwa “organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab”.

Selanjutnya Kochler (dalam Muhammad, 2011: 23-24) mengatakan bahwa “organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu”.

Hal yang sama diungkapkan oleh Wright (dalam Muhammad, 2011: 24) menjelaskan bahwa “organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu sistem terbuka, terstruktur dan terkoordinasi secara rasional dari aktivitas sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab.

b. Elemen Organisasi

Organisasi sangat bervariasi, ada yang sangat sederhana dan ada pula yang sangat kompleks. Faktor penentu kompleksitas suatu organisasi dapat diamati dengan melihat elemen organisasi yang bersangkutan.

Menurut Muhammad (2011: 25-28) elemen dasar organisasi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya antara lain:

- 1) Struktur sosial
Struktur adalah pola atau aspek aturan hubungan yang ada antara partisipan di dalam suatu organisasi. Struktur sosial dapat dipisahkan menjadi dua komponen yaitu struktur normatif dan struktur tingkah laku. Struktur normatif mencakup nilai, norma dan peranan yang diharapkan sedangkan struktur tingkah laku berfokus pada tingkah laku yang dilakukan bukan pada resep bertingkah laku.
- 2) Partisipan
Partisipan organisasi adalah individu-individu yang memberikan kontribusi kepada organisasi.

- 3) Tujuan
Bagi kebanyakan analis, tujuan merupakan suatu titik sentral petunjuk dalam menganalisis organisasi. Tujuan dibatasi sebagai suatu konsepsi akhir yang diinginkan atau kondisi yang partisipan harapkan mempengaruhinya, melalui penampilan tugas-tugas mereka.
- 4) Teknologi
Yang dimaksud dengan teknologi adalah penggunaan mesin-mesin atau perlengkapan mesin dan juga pengetahuan teknik dan keterampilan partisipan.
- 5) Lingkungan
Lingkungan disini memberikan perhatian terhadap pentingnya hubungan di antara tujuan organisasi dengan lingkungan masyarakat yang lebih luas. Hal ini penting karena tidak ada organisasi yang sanggup mencukupi kepentingan dirinya sendiri.

Selanjutnya menurut Priyono (2010: 107), organisasi terdiri dari empat elemen atau unsur yaitu:

- 1) Adanya dua orang atau lebih;
- 2) Adanya maksud untuk bekerja sama;
- 3) Adanya pengaturan hubungan; dan
- 4) Adanya tujuan yang hendak dicapai.

Setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, organisasi yang kompleks maupun sederhana, serta organisasi yang bergerak dibidang jasa maupun yang memproduksi barang, hendaknya selalu memperhatikan elemen atau unsur organisasi yang diungkapkan oleh para ahli diatas, sehingga organisasi yang diharapkan mampu terwujud.

c. Karakteristik Organisasi

Karakteristik atau nilai-nilai setiap organisasi pastilah berbeda, perbedaan tersebut tergantung pada bentuk organisasi bersangkutan. Namun setiap organisasi disamping mempunyai elemen yang umum juga mempunyai karakteristik yang umum.

Menurut Schein (dalam Muhammad, 2011: 23) organisasi mempunyai karakteristik tertentu, karakteristik tersebut antara lain meliputi:

- 1) Mempunyai struktur.
- 2) Mempunyai tujuan.
- 3) Saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain.
- 4) Tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut.

Selanjutnya menurut Muhammad (2011: 29-32) karakteristik organisasi diantaranya yaitu :

- 1) Dinamis
Artinya organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus-menerus mengalami perubahan, karena selalu menghadapi tantangan baru dari lingkungannya dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah tersebut. Faktor yang menjadikan organisasi bersifat dinamis adalah karena adanya perubahan ekonomi, perubahan pasaran, perubahan sosial, dan perubahan teknologi.
- 2) Memerlukan Informasi
Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa informasi organisasi tidak akan berjalan. Dengan adanya informasi bahan mentah dapat diolah menjadi hasil produksi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Untuk mendapatkan informasi dapat diperoleh melalui proses komunikasi.
- 3) Mempunyai Tujuan
Organisasi merupakan kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap organisasi harus mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Tujuan suatu organisasi dengan organisasi lainnya sangat bervariasi. Tujuan organisasi ini hendaknya dihayati oleh seluruh anggota organisasi, karena diharapkan setiap anggota dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui partisipasi mereka secara individual.
- 4) Terstruktur
Struktur organisasi artinya organisasi dalam usaha mencapai tujuannya biasanya membuat aturan-aturan, undang-undang dan hierarki hubungan dalam organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum setiap organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta (bukan milik pemerintah) memiliki karakteristik atau nilai-nilai yang meliputi dinamis, memerlukan informasi, mempunyai tujuan,

mempunyai struktur, saling berhubungan, dan aktivitas organisasi bergantung pada komunikasi manusia.

2. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *manage* (bahasa Latinnya: *manus*) yang berarti memimpin, mengatur, atau membimbing. Secara universal manajemen ini didefinisikan sebagai penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran dan kinerja yang tinggi dalam berbagai tipe organisasi profit ataupun nonprofit.

Para pakar atau ahli memiliki pendapat sendiri dalam memandang manajemen, dan berikut adalah pandangan para ahli atau pakar mengenai manajemen.

Hasibuan (dalam Mukarom dan Laksana, 2018: 46-47) mendefinisikan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”.

Selanjutnya Terry (dalam Mukarom dan Laksana, 2018: 46) mengemukakan bahwa:

Manajemen adalah proses yang khas dan terdiri atas tindakan-tindakan, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Sementara Gibson, Donnelly dan Ivancevich (dalam Mukarom dan Laksana, 2018: 80) mendefinisikan “manajemen sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas lain

untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni serta proses yang khas yang dilakukan oleh satu atau lebih individu dalam mengatur dan mengoordinasikan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dengan melakukan tindakan atau aktivitas seperti perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan dan pengawasan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Prinsip-prinsip Manajemen

Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Prinsip-prinsip manajemen ini bersifat fleksibel bukan mutlak, dan harus bisa dipakai tanpa mempedulikan kondisi-kondisi yang berubah atau khusus.

Fayol (dalam Ranjabar, 2015: 30-32) memberikan 14 prinsip umum manajemen yang didasarkan pada pengalamannya, yaitu:

- 1) **Pembagian kerja**
Inilah spesialisasi yang oleh para ahli ekonomi dianggap perlu bagi efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Fayol menerapkan prinsip ini pada segala macam pekerjaan, baik yang bersifat manajerial maupun teknis.
- 2) **Otoritas dan tanggung jawab**
Fayol melihat bahwa otoritas adalah gabungan faktor-faktor resmi yakni berasal dari kedudukan manajer dan faktor pribadi, yakni “gabungan faktor-faktor kecerdasan, pengalaman, nilai moral, jasa di masa lampau dan seterusnya”.
- 3) **Disiplin**
Dengan melihat disiplin sebagai penghargaan atas kesepakatan yang ditujukan untuk meningkatkan timbulnya ketaatan, ketekunan, energi dan sikap menghargai lainnya. Fayol mengatakan bahwa untuk menegakkan disiplin diputuskan yang baik pada segala tingkat.

- 4) Kesatuan komando
Ini berarti bahwa para pegawai harus menerima perintah dari seorang atasan saja.
- 5) Kesatuan pengarahan
Menurut prinsip ini, setiap kelompok aktivitas dengan tujuan yang sama harus mempunyai satu kepala dan satu rencana.
- 6) Menomorduakan kepentingan perorangan terhadap kepentingan umum
Ini sudah cukup jelas, kalau kedua-duanya ternyata berbeda, maka manajemen harus mendamaikannya.
- 7) Gaji
Gaji dan metode pembayaran harus adil dan memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada para karyawan dan majikan.
- 8) Sentralisasi
Tanpa pemakaian istilah “sentralisasi otoritas”, Fayol menunjuk pada taraf dimana otoritas dipusatkan atau disebarkan.
- 9) Rantai skalar
Fayol menganggap “rantai skalar” sebagai peringkat pangkat mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.
- 10) Tata tertib
Pada pokoknya hal ini merupakan prinsip organisasi dalam mengatur benda dan manusia.
- 11) Keadilan
Kesetiaan dan bakti akan diperoleh dari para karyawan bila diimbangi dengan keramah-tamahan dan keadilan dari pihak para manajer pada saat berhubungan dengan bawahan.
- 12) Stabilitas masa jabatan
Karena berpendapat bahwa pergantian yang tidak perlu adalah sebab dan akibat dari manajemen yang buruk, Fayol mengingatkan akan bahaya dan kerugiannya.
- 13) Inisiatif
Inisiatif diartikan sebagai pemikiran dan pelaksanaan suatu rencana. Karena perwujudan inisiatif adalah salah satu “kepuasan terhebat bagi seorang yang cerdas”, Fayol mendesak para manajer untuk “mengorbankan kesombongan pribadi” guna membiarkan bawahan mereka menjalankannya.
- 14) Semangat korps
Inilah prinsip bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh dan juga suatu perluasan prinsip kesatuan komando, dengan menekankan perlunya kerjasama kelompok dan pentingnya komunikasi dalam mencapainya.

Hal yang sama mengenai prinsip-prinsip manajemen juga diungkapkan oleh Winardi (dalam Wijaya dan Rifa'i, 2016: 20) yaitu:

- 1) Pembagian kerja

- 2) Otoritas dan tanggung jawab
- 3) Disiplin
- 4) Kesatuan perintah
- 5) Kesatuan arah
- 6) Dikalihkannya kepentingan individu terhadap kepentingan umum
- 7) Penghargaan/balas jasa
- 8) Sentralisasi
- 9) Rantai bertangga
- 10) Keteraturan
- 11) Keadilan
- 12) Stabilitas pelaksanaan pekerjaan
- 13) Inisiatif
- 14) Jiwa korps

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penting bagi seorang manajer atau pimpinan organisasi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan manajemennya berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen sebagai dasar dan nilai-nilai keberhasilan manajemen yang mereka jalankan.

c. **Fungsi Manajemen**

Secara umum manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Dari definisi di atas, jelas bahwa fungsi manajemen ini merupakan elemen dasar yang melekat dalam proses manajemen dan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Terry (dalam Hasibuan, 2017: 3) fungsi manajemen terdiri dari:

- 1) Perencanaan (*Planning*)
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*)
- 3) Penggerakan (*Actuating*)
- 4) Pengawasan (*Controlling*)

Sedangkan Gullick (dalam Hasibuan, 2017: 3) membagi fungsi manajemen menjadi tujuh bagian yaitu:

- 1) *Planning* (perencanaan)
- 2) *Organizing* (pengorganisasian)
- 3) *Staffing* (kepegawaian)
- 4) *Directing* (pengarahan)
- 5) *Coordinating* (pengkoordinasian)
- 6) *Reporting* (pelaporan)
- 7) *Budgetting* (penganggaran)

Sementara Urwick (dalam Hasibuan, 2017: 3) membagi fungsi manajemen kedalam enam fungsi, yaitu:

- 1) *Forecasting* (peramalan)
- 2) *Planning* (perencanaan)
- 3) *Organizing* (pengorganisasian)
- 4) *Commanding* (pemberian komando)
- 5) *Coordinating* (Pengkoordinasian)
- 6) *Controlling* (Pengawasan)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli tidaklah sama, hal itu bergantung pada sudut pendekatan dan pandangan mereka. Dalam prakteknya akan lebih baik jika pendapat ketiganya mampu diterapkan oleh manajer dalam organisasi yang dipimpinnya dengan urutan yang tepat, sehingga proses manajemen berjalan dengan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai.

D. Kaitan Administrasi Negara dengan Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat

Menurut Pfiffner (dalam Anggara, 2018: 92) berpendapat bahwa:

Public administration is the coordinating of collective efforts to implement public policy.

(Administrasi negara adalah koordinasi dari usaha-usaha kolektif yang dimaksudkan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah).

Dikarenakan kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam rangka menata kehidupan publik (masyarakat), maka dalam prosesnya masyarakat tidak saja menjadi objek atau sasaran daripada kebijakan itu sendiri, tetapi dalam hal ini masyarakat juga perlu bertindak sebagai subjek dengan ikut melibatkan diri atau berpartisipasi sehingga kebijakan yang akan diimplementasikan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Pentingnya keterlibatan atau partisipasi masyarakat ini dikarenakan masyarakatlah yang paling mengetahui dan memahami apa yang diperlukannya untuk kesejahteraan hidupnya. Salah satu kebijakan yang perlu keterlibatan masyarakat dalam prosesnya yang saat ini gencar dilakukan dalam rangka menghapus kesenjangan adalah kebijakan dalam bidang pembangunan. Seperti yang telah diungkapkan di atas peran atau partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan bukan hanya sebagai objek yang menikmati hasil pembangunan akan tetapi juga harus turut serta atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya seperti kegiatan perencanaan pembangunan, dimana salah satu forum yang memungkinkan partisipasi masyarakat adalah Musrenbang.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Slamet (dalam Bahua, 2018: 5) yang menyatakan bahwa “partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi negara merupakan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah seperti kebijaksanaan pembangunan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga terjalin koordinasi yang baik dari usaha-usaha kolektif yang dijalankan.

E. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari Bahasa Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata dalam Bahasa Yunani dan Sansakerta yaitu *polis* (negara kota) dan *pur* (kota) kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam Bahasa Inggris *policie*, yang artinya menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Sedangkan secara terminologi kebijakan publik (*public policy*) memiliki banyak pengertian tergantung dari sudut mana mengartikannya.

Para pakar atau ahli memiliki pendapat sendiri dalam memandang kebijakan publik, dan berikut adalah pandangan para ahli atau pakar mengenai kebijakan publik.

Islamy (dalam Anggara, 2016: 501) mengemukakan bahwa “kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat”.

Selanjutnya Anderson (dalam Tachjan, 2006: 16) mengemukakan bahwa:

Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials.

(Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Sementara Chandler dan Plano (dalam Kadji, 2015: 8) menjelaskan bahwa “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan, dikembangkan, dilaksanakan dan tidak dilaksanakan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik dan mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat

2. Komponen Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik secara umum merupakan ilmu terapan dan berperan sebagai alat atau ilmu yang berusaha untuk memecahkan masalah. Guna kepentingan analisis terhadap suatu kebijakan publik, para pakar atau ahli membedakan kebijakan dalam beberapa komponen.

Eulau dan Prewitt (dalam Anggara, 2016: 510-511) membedakan komponen umum kebijakan yang meliputi:

- a. Niat (*intentions*): tujuan-tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.
- b. Tujuan (*goal*): keadaan akhir yang hendak dicapai.
- c. Rencana atau usulan (*plans or proposal*): cara yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
- d. Program: cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.
- e. Keputusan atau pilihan (*decision or choices*): tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi program.

- f. Pengaruh (*effects*): dampak program yang dapat diambil yang diharapkan dan tidak diharapkan, yang bersifat primer atau yang bersifat sekunder.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Jones (dalam Kadji, 2015: 10)

yang menegaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari komponen-komponen yang meliputi:

- a. *Goal* atau tujuan yang diinginkan.
- b. *Plans* atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.
- c. *Programs*, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.
- d. *Decision* atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
- e. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan publik terdiri dari beberapa komponen atau unsur yaitu niat, tujuan, rencana, program, keputusan dan efek.

3. Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan dilakukan untuk menciptakan daya kritis dalam menilai, serta mampu mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau beberapa tahap dalam proses perumusan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang waktu dan saling berhubungan.

Anderson (dalam Kadji, 2015: 14-15) menetapkan proses kebijakan publik

kedalam lima tahapan, tahapan tersebut antara lain meliputi:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*): Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk

- memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption formulation*): Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
 - d. Implementasi (*implementation*): Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
 - e. Evaluasi (*evaluation*): Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Sementara Howlet dan Ramesh (dalam Subarsono 2020: 13-14)

menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan yaitu:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan publik diawali dari penyusunan agenda, formulasi masalah, formulasi kebijakan, penentuan atau pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

4. Model Kebijakan Publik

Model suatu kebijakan publik merupakan landasan yang dapat dijadikan sebagai dasar dari kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan dalam proses pembangunan.

Menurut Thoha (dalam Tahir, 2014: 30) model-model kebijakan publik antara lain:

- a. Model Elite (*Policy* sebagai Preferensi Elite)
- b. Model Kelompok (*Policy* sebagai Keseimbangan Kelompok)
- c. Model Kelembagaan (*Institution Model*) (*Policy* sebagai Hasil dari Lembaga)
- d. Model Proses (*Policy* sebagai Suatu Aktivitas Politik)
- e. Model Rasionalisme (*Policy* sebagai Pencapaian Tujuan yang Efisien)
- f. Model Inkrementalisme (*Policy* sebagai Kelanjutan Masa Lalu)
- g. Model Sistem (*Policy* sebagai Hasil dari Suatu Sistem)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Dye (dalam Anggara, 2016: 520) yang menguraikan model-model kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Model Elite (Kebijakan sebagai Preferensi Elite)
- b. Model Kelompok (Kebijakan sebagai Keseimbangan Kelompok)
- c. Model Kelembagaan (*Institution Model*) Kebijakan sebagai Hasil dari Lembaga
- d. Model Proses (Kebijakan sebagai Suatu Aktivitas Politik)
- e. Model Rasionalism (Kebijakan sebagai Pencapaian Tujuan yang Efisien)
- f. Model Incrementalism (Kebijakan sebagai Kelanjutan Masa Lalu)
- g. Model Sistem (Kebijakan sebagai Hasil dari Suatu Sistem)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh model kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai pengetahuan tentang dasar dan analisis dalam pembuatan kebijakan publik serta kriteria dalam implementasi kebijakan publik yang meliputi model elite, model kelompok, model kelembagaan, model proses, model rasionalisme, model inkrementalisme dan model sistem.

F. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis implementasi yang berasal dari bahasa Latin *to implement* dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan

penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Para pakar atau ahli memiliki pendapat sendiri dalam memandang implementasi kebijakan, dan berikut adalah pandangan para ahli atau pakar mengenai implementasi kebijakan.

Edwards III (dalam Kadji, 2015: 47) menjelaskan bahwa:

(Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wahab (dalam Anggara, 2016: 530) dengan mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden”.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 61-62) menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan adalah proses, tahapan dan tindakan melaksanakan

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, dekrit presiden atau keluarnya standar peraturan yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan lainnya yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan.

2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan

Agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam kegiatan perencanaan, maka dalam proses pengimplementasiannya harus memerhatikan berbagai unsur atau aspek dalam implementasi kebijakan.

Menurut Smith (dalam Tachjan: 2006: 26-36) Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah:

- a. Unsur pelaksana (implementor)
Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan.
- b. Adanya program yang akan dilaksanakan
Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program-program yang bersifat operasional.
Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani.
- c. Target *groups*
Target *groups* (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran) seperti: besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial-ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi.

Sementara Anderson (dalam Tahir, 2014: 56-57) menyatakan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,
- b. Hakikat proses administrasi,
- c. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
- d. Efek atau dampak dari implementasi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang merupakan proses untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan ini berkaitan erat dengan manusia dan usaha-usaha yang mengarah pada pencapaian program yang telah ditetapkan.

3. Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Keberhasilan pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan dapat diukur dengan menggunakan berbagai faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan.

Menurut Abidin (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 59) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan antara lain meliputi:

- a. Faktor utama internal, yang terdiri dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung.
- b. Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan (*environment*) dan pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Slamet (dalam Sunarti 2003: 79) yang menyebutkan bahwa faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan meliputi:

- a. Faktor internal
 - 1) Kesadaran/kemauan
 - 2) Usia
 - 3) Tingkat pendidikan
 - 4) Jenis pekerjaan
 - 5) Besarnya pendapatan
 - 6) Lamanya tinggal
- b. Faktor eksternal
 - 1) Komunikasi
 - 2) Kepemimpinan pemerintah
 - 3) Fasilitas yang tersedia

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang akan memengaruhi pelaksanaan atau implementasi sebuah kebijakan yaitu faktor internal dan faktor eksternal kebijakan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka implementasi kebijakan publik pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat dan lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Model Mazmanian dan Sabatier yang ditawarkan oleh Mazmanian dan Sabatier (dalam Kadji, 2015: 56-58) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yakni:

- a. Variabel independen
Mudah tidaknya masalah dikendalikan berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki.

- b. Variabel intervening
Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber daya dan dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan implementor kebijakan serta keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.
- c. Variabel dependen
Tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu:
- 1) Pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana,
 - 2) Kepatuhan obyek,
 - 3) Hasil nyata,
 - 4) Penerimaan atas hasil nyata, dan
 - 5) Revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model Grindle model yang dijelaskan oleh Grindle (dalam Kadji, 2015: 59-60) menegaskan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil dipengaruhi oleh:

- a. *Content of Policy* (isi kebijakan)
Content of Policy (Isi kebijakan) yang dimaksud meliputi:
- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*interest affected*),
 - 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*type of benefit*),
 - 3) Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*),
 - 4) Kedudukan pembuat kebijakan (*site of decision making*),
 - 5) Pelaksana program (*program implementors*), dan
 - 6) Sumber daya yang dikerahkan (*resources committed*).
- b. *Contex of Implementation* (konteks implementasi)
Contex of Implementation (konteks implementasi) adalah:
- 1) Kekuasaan (*power*),
 - 2) Kepentingan strategi aktor yang terlibat (*interest strategies of actors involed*),
 - 3) Karakteristik lembaga dan penguasa (*institution and regime characteristic*), dan
 - 4) Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (*compliance and responsivnes*)

Model Edwards III yang dikembangkan oleh Edwards III (1980: 9-12)

menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. *Communication* (Komunikasi)

For implemetation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate, and consistent. If the policies decisionmakers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementors about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. Jika pesan dan perintah kebijakan yang diberikan oleh pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terspesifikasikan, maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman di tingkat implementor kebijakan yang ditunjuk. Jelas sekali akan terjadi kebingungan di tingkat implementor, khususnya dalam memahami deskripsi tugas yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memberi peluang kepada mereka untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat atau pembuat kebijakan.

Inadequate communications also provide implementors with discretion as they attempt to turn general policies into specific actions. This discretion will not necessarily be exercised to further the aims of the original decisionmakers. Thus, implementation instructions that are not transmitted, that are distorted in transmission, or that are vague or inconsistent present serious obstacles to policy implementations. Convenserly, directives that are too precise may hinder implementation by stifling creativity and adaptability.

Komunikasi yang tidak memadai juga memberikan keleluasaan bagi pelaksana saat mereka mencoba mengubah kebijakan umum menjadi tindakan tertentu. Kebijaksanaan ini tidak akan selalu digunakan untuk mencapai tujuan pembuat keputusan awal. Dengan demikian, instruksi implementasi yang tidak dikirimkan, yang terdistorsi dalam transmisi, atau yang tidak jelas atau tidak konsisten menghadirkan hambatan serius bagi implementasi kebijakan. Secara

keseluruhan, arahan yang tidak terlalu tepat dapat menghambat implementasi dengan menghambat kreativitas dan kemampuan beradaptasi.

b. *Resources* (Sumber Daya)

No matter how clear and consistent implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not be effective. Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure that policies are carried out as they are intended; and facilities (including buildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik. Sumber daya yang tidak mencukupi berarti bahwa hukum tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan disediakan, dan peraturan yang wajar tidak akan dikembangkan.

c. *Dispositions* (Disposisi)

The dispositions or attitudes of implementors is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation of policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complexity of the policies themselves. The way in which implementors exercise their discretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies affecting their organizational and personal interests.

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk

melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para implementor menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap eksistensi dari pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas masalah dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para implementor menggunakan otoritasnya tergantung dari kecenderungan sikap mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

Implementors are not always disposed to implement policies as those who originally made them would like. Consequently, decisionmakers are often faced with the task of trying to manipulate or work around implementors dispositions or to reduce their discretion.

Para implementor tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya.

d. *Bureaucratic Structure* (Struktur Birokrasi)

Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.

Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan proses implementasi sebuah kebijakan. Disisi lain bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan kerjasama yang melibatkan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

As organizational units administer policies they develop standard operating procedures (SOPs) to handle the routine situations with which they regularly deal. Unfortunately, SOPs designed for ongoing policies are often inappropriate for new policies and may

cause resistance to change, delay, waste, or unwanted actions. SOPs sometimes hinder rather than help policy implementation.

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar operasional prosedur untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya SOP dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan yang tidak dikehendaki. SOP kadang-kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap ahli memiliki cara yang berbeda untuk mendeskripsikan substansi dari implementasi kebijakan (*policy implementation*). Jika Mazmanian dan Sabatier mendeskripsikan implementasi melalui tiga variabel yaitu variabel dependen, intervening dan indeviden, maka Grindle mendeskripsikan keberhasilan implementasi kebijakan melalui *Content of Policy* (isi kebijakan) dan *Contex of Implementation* (konteks implementasi). Sementara Edwards III mendeskripsikan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

5. Masalah-masalah dalam Implementasi Kebijakan

Mengingat kondisi riil yang sering berubah dan sulit diprediksi mengakibatkan tidak semua kebijakan dapat diimplementasikan dengan sempurna sesuai dengan rumusan kebijakan dalam perencanaan. Ketidaksempurnaan inilah yang kemudian menimbulkan masalah-masalah yang akan menghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

Salusu (dalam Tahir, 2014: 60) yang menyetir pandangan dari Alexander tentang masalah yang sering dijumpai dalam melaksanakan suatu strategi atau kebijakan, yaitu:

- a. Jangka waktu pelaksanaan lebih lama dari yang direncanakan, koordinasi tidak berjalan secara efektif, pelaksana tidak memiliki keterampilan yang memadai, faktor eksternal kurang terkontrol dan sering dilupakan.
- b. Kualitas kepemimpinan yang kurang memadai sehingga pengarahan, instruksi kepada karyawan sering tidak tepat, pelatihan yang disyaratkan jarang dilakukan, monitoring atas pelaksanaan tugas eselon bawah sangat lemah.

Selanjutnya Warnham (dalam Tahir, 2014: 60) masalah lain yang menghambat implementasi kebijakan dikarenakan adanya kesenjangan yang meliputi:

- a. Tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan.
- b. Kurangnya informasi.
- c. Tujuan-tujuan dari unit-unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan harus mengkaji semua hal secara menyeluruh termasuk mengkaji masalah yang mungkin timbul dalam kebijakan yang diimplementasikan secara matang, sehingga ketika ditemukan masalah dalam pelaksanaan kebijakan tidak kehilangan arah karena sudah mempersiapkan berbagai rencana atau alternatif dari masalah-masalah yang muncul tersebut.

G. Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau turut serta. Lebih lanjut di kemukakan bahwa secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”. Sementara secara terminologi partisipasi dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok yang

selama ini tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan (*nonelite*) dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan (*elite*).

Para pakar atau ahli memiliki pendapat sendiri dalam memandang partisipasi, dan berikut adalah pandangan para ahli atau pakar mengenai partisipasi.

Menurut Rusidi (dalam Bahua, 2018: 14) menjelaskan bahwa:

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pihak lain (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintah dan sebagainya), dimana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga, sesuai dengan harapan kegiatan itu.

Mardikanto dan Soebiato (dalam Hamid, 2018: 149) mengartikan “partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat”.

Menurut Davis dan Nestrom (dalam Hamid, 2018: 148), menjelaskan bahwa:

partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi adalah keikutsertaan, keterlibatan dan tindakan secara mental dan emosional seseorang untuk ambil bagian dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak lain dengan berkontribusi dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga dengan maksud untuk berbagi tanggung

jawab dalam mencapai tujuan kelompok dan usaha yang bersangkutan sehingga diperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Jika dikaitkan dengan masyarakat, maka partisipasi merupakan keikutsertaan, keterlibatan dan tindakan masyarakat untuk ambil bagian dalam suatu kegiatan berupa kontribusi pikiran, materil dan tenaga dengan maksud adanya pembagian tanggung jawab dalam mencapai tujuan sehingga diperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

2. Faktor Pendorong Partisipasi

Partisipasi atau keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, oleh karenanya diperlukan dukungan dan dorongan yang maksimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat menurut Jim dan Tesoriero (dalam Hamid, 2018: 164-165) adalah sebagai berikut:

- a. Orang akan berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa isu atau aktivitas tersebut penting. Cara ini dapat secara efektif dicapai jika masyarakat sendiri telah mampu menentukan isu atau aksi, dan telah mendominasi kepentingannya, bukan berasal dari orang luar yang memberikan mereka apa yang harus dilakukan.
- b. Orang harus merasa bahwa aksi mereka akan membuat perubahan terhadap prospek peluang kerja lokal, akan kecil insentif untuk berpartisipasi. Perlu dibuktikan bahwa masyarakat dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat perbedaan dan akan menghasilkan suatu perubahan.
- c. Berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai.
- d. Orang harus bisa berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya. Hal ini berarti bahwa isu-isu seperti keamanan waktu, lokasi kegiatan, dan lingkungan tempat kegiatan akan dilaksanakan sangat penting dan perlu diperhitungkan dalam perencanaan proses berbasis masyarakat.

Sementara menurut Slamet (dalam Hamid, 2018: 158-159) faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yaitu:

- a. Adanya kesempatan, yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan, yaitu adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
- c. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, bisa berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong dan mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan selain karena adanya kemauan dan kemampuan individu masyarakat bersangkutan, juga harus adanya kesempatan dan pengakuan atau penghargaan atas partisipasinya dari lingkungan terkait.

3. Dimensi Partisipasi

Partisipasi dipandang sebagai salah satu komponen yang perlu diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat, hal tersebut dikarenakan partisipasi memiliki pengaruh yang besar dalam terselenggaranya aktivitas dan tercapainya tujuan pembangunan. Banyak aspek yang menjadi tolak ukur partisipasi.

Rusidi (dalam Tawai dan Yusuf, 2017: 14) menjelaskan bahwa dalam partisipasi terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan dimensi partisipasi, yaitu:

- a. Pencurahan atau sumbangan pikiran (gagasan atau ide-ide),
- b. Pencurahan/sumbangan materil (dana), dan
- c. Pencurahan atau sumbangan tenaga.

Menurut Oakley (dalam Haq, 2016: 90) berdasarkan definisi konseptual diperoleh 3 (tiga) dimensi kajian, yakni:

- a. Dimensi Kontribusi Masyarakat
 - 1) Kontribusi pemikiran,
 - 2) Kontribusi dana,
 - 3) Kontribusi tenaga, dan
 - 4) Kontribusi sarana.
- b. Dimensi Pengorganisasian Masyarakat
 - 1) Model pengorganisasian,
 - 2) Struktur pengorganisasian,
 - 3) Unsur-unsur pengorganisasian, dan
 - 4) Fungsi pengorganisasian.
- c. Dimensi Pemberdayaan Masyarakat
 - 1) Peran masyarakat,
 - 2) Aksi masyarakat,
 - 3) Motivasi masyarakat, dan
 - 4) Tanggungjawab masyarakat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa para ahli memiliki pandangan yang hampir serupa mengenai tolak ukur daripada partisipasi masyarakat. Jika ahli pertama menilai tolak ukur partisipasi secara sempit hanya dari pencurahan gagasan, dana dan tenaga, maka ahli yang kedua menilai tolak ukur partisipasi masyarakat secara lebih luas dengan tiga dimensi kajiannya yaitu kontribusi masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dimana ketiga dimensi yang dikemukakan oleh ahli yang pertama termasuk dalam indikator dari dimensi yang dikemukakan oleh ahli yang kedua.

4. Bentuk atau Tahap Partisipasi

Pada periode dasawarsa 1950-an dan 1960-an, peranserta atau partisipasi didefinisikan secara politis sepenuhnya, namun dalam dasawarsa 1970-an, peranserta tidak lagi terutama didefinisikan sebagai proses politik dan elektoral tetapi mulai dihubungkan dengan proses administratif.

Proses administratif dinilai sebagai alternatif bagi penanggulangan penolakan. Di samping itu, proses politik sering dapat merancang preferensi

masyarakat, dengan demikian peranserta akan mempunyai dampak lebih besar dalam proses pelaksanaan program. Proses pelaksanaan program mempunyai kemungkinan menjadi arena utama tempat individu dan kelompok dapat mengejar dan bersaing memperebutkan sumber-sumber daya yang langka. Bahkan proses pelaksanaan ini mungkin merupakan mata rantai utama dalam interaksi antara pemerintah dan warganegara. Peran serta dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program dapat mengembangkan kemandirian (*self-reliance*) yang dibutuhkan oleh para anggota masyarakat demi akselerasi pembangunan.

Dalam diskursus teori pembangunan, pendekatan terhadap partisipasi masyarakat dimaknai sebagai kontribusi masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan, sehingga diharapkan para fasilitator mampu menempatkan partisipasi sebagai instrumen utama dalam pembangunan masyarakat. Bentuk atau tahap partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak saja sebagai penikmat hasil pembangunan akan tetapi sebagai komponen yang harus turut serta dalam proses pembangunan.

Ndraha (dalam Mulyawan, 2016: 95-56) menyebutkan adanya beberapa bentuk atau tahap partisipasi antara lain sebagai berikut:

- a. Partisipasi dalam atau melalui dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan.
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (*mentaati, memenuhi, melaksanakan*), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (*penerapan rencana*). Perasaan terlibat dalam merencanakan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka, dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.

- d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan.
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Cohen dan Uphof (dalam Riyanda, 2016: 36) yang membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 bentuk/tingkatan yaitu:

- a. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang dan partisipasi dalam bentuk harta benda.
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek yang telah dibangun.
- d. Evaluasi yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta mengawasi, menilai secara tidak langsung misalnya dengan memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk atau tahap partisipasi masyarakat sangatlah kompleks, diawali dari partisipasi dengan pihak lain, memberi tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan penilaian atau evaluasi.

H. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya,

di samping itu kajian penelitian terdahulu juga membantu dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga kajian penelitian terdahulu yang tentunya memiliki keterkaitan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini, kajian penelitian terdahulu yang penulis gunakan berasal dari tiga universitas yang berbeda yaitu dari STIA Sebelas April Sumedang, UNIKOM dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berikut adalah tabel kajian penelitian terdahulu yang penulis gunakan.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa terhadap Perilaku Pemilih di Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang (Tuti Robi Adawiyah, STIA)	Variabel X Implementasi Kebijakan	Variabel Y Perilaku Pemilih	<p>a. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>b. Sampel penelitian berjumlah 96 orang yang diperoleh dengan teknik simple random sampling.</p> <p>c. Analisis yang digunakan terdiri dari perhitungan persentase, uji normalitas data, uji koefisien korelasi, uji signifikansi dan uji koefisien determinasi.</p> <p>d. Hasil penelitian</p>

				<p>menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kepala desa dan perilaku pemilih di Desa Karangpakuan berada pada kriteria kuat dengan hasil sebesar 71,17% dan 71,55%. Dari hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa variabel implementasi kebijakan pemilihan kepala desa berpengaruh terhadap perilaku pemilih sebesar 56,25%.</p>
2.	<p>Pengaruh Komunikasi Pemerintah terhadap Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung.</p> <p>(Agus Deny Rahmat Hidayat, 2016) UNIKOM</p>	<p>Variabel Y Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Variabel X Komunikasi Pemerintah</p>	<p>a. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>b. Data-data diperoleh melalui penyebaran angket, observasi non partisipan, studi kepustakaan dan dokumentasi.</p> <p>c. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Simple Random Sampling.</p> <p>d. Hasil penelitian</p>

				menunjukkan bahwa berdasarkan uji koefisien determinasi komunikasi pemerintah berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat sebesar 68,7519%.
3.	<p>Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Cibiru Kota Bandung.</p> <p>(Ayuspiaka N Pribadi, 2013) UIN Sunan Gunung Djati Bandung</p>	Meneliti 2 Variabel	Partisipasi Masyarakat sebagai variabel X dan Implementasi Kebijakan sebagai Variabel Y	<p>a. Teori partisipasi menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff sementara implementasi kebijakan menggunakan teori dari Edward III.</p> <p>b. Metode penelitian menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>c. Sampel penelitian berjumlah 100 orang yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin dan teknik probability sampling.</p> <p>d. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan</p>

				sampah sebesar 69,9%.
--	--	--	--	-----------------------

I. Hubungan Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui hubungan Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat, penulis mencoba mengkajinya dari hasil penelitian sebelumnya dan pendapat ahli terkait hubungan kedua variabel tersebut.

Hasil penelitian Akadun (2011: 185) mengungkapkan bahwa dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berimplikasi pada urusan publik, pemerintah berkewajiban untuk melakukan konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelum ditetapkan harus melewati sebuah proses konsultasi publik. Forum konsultasi publik yang diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan dilakukan dengan Musrenbang.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam Implementasi sebuah kebijakan publik juga diungkapkan oleh Igbal (dalam Akadun, 2011: 185) yang menyatakan bahwa “partisipasi diperlukan untuk mencapai keberhasilan program di mana partisipasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu perencanaan pembangunan”.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki hubungan dengan partisipasi masyarakat, hubungan tersebut terjadi karena setiap implementasi kebijakan yang berimplikasi pada masyarakat atau publik harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat.

J. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1. Kerangka Pemikiran

Fokus penelitian ini adalah Pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Pada dasarnya implementasi kebijakan merupakan tindakan melaksanakan keputusan suatu kebijakan yang sebelumnya telah melalui proses perumusan. Berikut adalah pengertian implementasi kebijakan menurut para ahli.

Edwards III (dalam Kadji, 2015: 47) menjelaskan bahwa:

(Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy for the people whom it affects).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pembuatan keputusan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wahab (dalam Anggara, 2016: 530) dengan mendefinisikan “implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden”.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Abdoellah dan Rusfiana, 2016: 61-62) menjelaskan bahwa “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan”.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu aktivitas penting dalam kebijakan, karena dikatakan suatu kebijakan hanya akan menjadi “macan kertas” apabila tidak berhasil diimplementasikan. Artinya sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pembuatnya. Hal yang sama juga terjadi pada kebijakan musyawarah perencanaan pembangunan (Murenbang), jika kebijakan Musrenbang tidak diimplementasikan dengan baik dan optimal, maka kemungkinan besar tujuan Musrenbang yang telah ditetapkan sebelumnya tidak akan tercapai.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, agar kebijakan publik yang dimaksud benar-benar dapat berfungsi sebagai alat untuk merealisasikan harapan yang diinginkan.

Menurut kerangka pemikiran Edwards III (1980: 9-12) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Komunikasi
 - 1) *Transmission* (wahana sosialisasi)
 - 2) *Clarity* (Kejelasan)
 - 3) *Consistency* (Konsistensi)
- b. Sumberdaya
 - 1) Kemampuan implementor
 - 2) Sarana dan prasarana
 - 3) Dana
- c. Disposisi
 - 1) Menolak
 - 2) Netral (Acuh)
 - 3) Mendukung
- d. Struktur birokrasi
 - 1) SOP

2) Fragmentasi (tersebarnya tanggung jawab kebijakan).

Ditinjau dari faktor kebijakan diatas, diketahui bahwa banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan, dimana setiap faktor memegang peranan penting dalam terlaksananya sebuah kebijakan. Namun faktor sumberdaya merupakan sorotan utama dalam implementasi kebijakan, karena tanpa sumberdaya sebuah kebijakan tidak akan dapat berjalan.

Sumberdaya disini meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dana. Membahas mengenai sumberdaya manusia, dalam implementasi kebijakan manusia merupakan komponen terpenting karena manusia merupakan otak dari sebuah kebijakan. Sehingga dalam aktivitas kebijakan harus ditentukan manusia mana saja yang perlu berpartisipasi dalam membantu suksesnya implementasi kebijakan yang merupakan salah satu aktivitas dari kebijakan. Misalnya dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka perlu menempatkan masyarakat bukan saja sebagai objek pembangunan akan tetapi sebagai subjek dari pembangunan. Artinya dalam prosesnya harus melibatkan dan mendorong adanya partisipasi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, hal itu karena masyarakatlah yang paling memahami dan mengetahui apa dibutuhkannya untuk kesejahteraan hidupnya.

Berikut adalah teori yang dikemukakan oleh para ahli mengenai partisipasi masyarakat.

Menurut Rusidi (dalam Bahua, 2018: 14) menjelaskan bahwa:

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pihak lain (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintah dan sebagainya), dimana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam

bentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga, sesuai dengan harapan kegiatan itu.

Mardikanto dan Soebiato (dalam Hamid, 2018: 149) mengartikan “partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat”.

Menurut Davis dan Nestrom (dalam Hamid, 2018: 148), menjelaskan bahwa:

partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggung jawab pencapaian tujuan dalam usaha mencapai tujuan, serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat khususnya dalam membantu mensukseskan pembangunan sangatlah beragam. Berikut dikemukakan oleh salah seorang ahli bentuk partisipasi masyarakat yang harus dilakukan untuk membantu mensukseskan pembangunan.

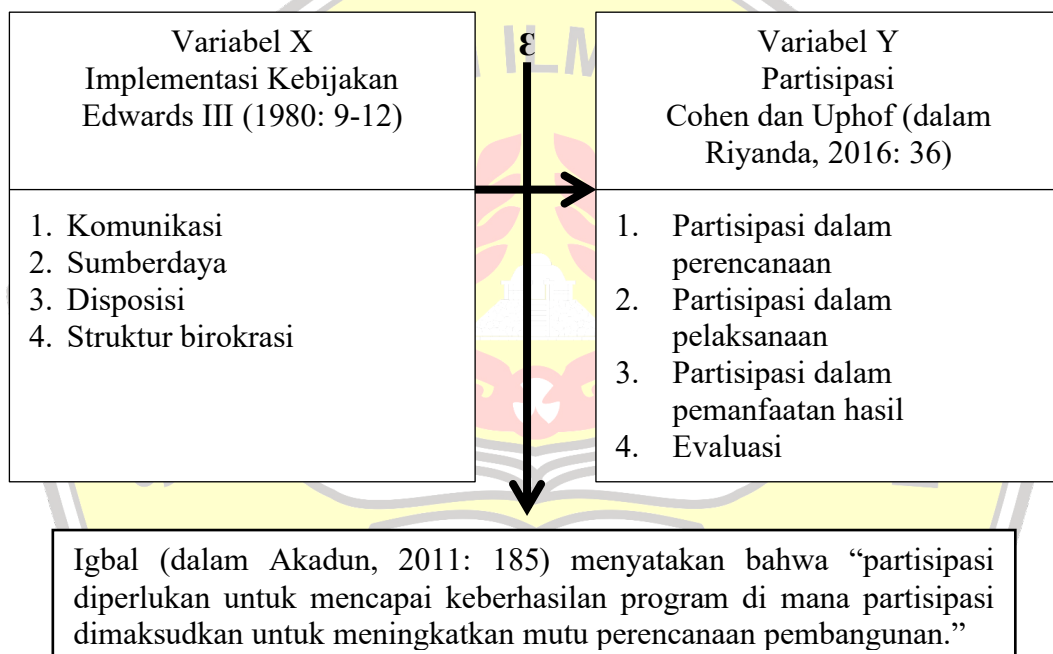
Cohen dan Uphof (dalam Riyanda, 2016: 36) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 bentuk/tingkatan yaitu:

- a. Partisipasi dalam perencanaan
 - 1) Kehadiran rapat
 - 2) Ikut serta dalam penyusunan program pembangunan
 - 3) Ikut serta dalam penetapan program pembangunan
 - 4) Sumbangan pemikiran untuk pembangunan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan
 - 1) Partisipasi dalam bentuk tenaga
 - 2) Partisipasi dalam bentuk uang
 - 3) Partisipasi dalam bentuk harta benda
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
 - 1) Ikut serta memanfaatkan program yang ditetapkan
 - 2) Ikut serta memanfaatkan hasil proyek yang dibangun

- d. Evaluasi
 - 1) Penilaian dan pengawasan secara langsung
 - 2) Penilaian dan pengawasan secara tidak langsung

Berikut adalah kerangka pemikiran dari Pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. (Sugiyono, 2017: 70)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- a. Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang baik.

- b. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang baik.
- c. Terdapat hubungan antara Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.
- d. Terdapat pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

Dari uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis statistiknya sebagai berikut:

- a. $H_0 : \rho < 75\%$, artinya Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang mencapai kurang dari 75% dari kriteria ideal.
 $H_a : \rho \geq 75\%$, artinya Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang mencapai lebih besar dari atau sama dengan 75% dari kriteria ideal.
- b. $H_0 : \rho < 75\%$, artinya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang mencapai kurang dari 75% dari kriteria ideal.

Ha : $\rho \geq 75\%$, artinya Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang mencapai lebih dari atau sama dengan 75% dari kriteria ideal.

- c. Ho : $r_{xy} = 0$, artinya tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

Ha : $r_{xy} \neq 0$, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

- d. Ho : $\alpha = 0$, artinya tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

Ha : $\alpha \neq 0$, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional (masuk akal), empiris (dapat diamati oleh indera manusia) dan sistematis (menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian yang dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Sugiyono (2009: 21) menjelaskan bahwa “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Selanjutnya Nazir (2003: 4) mengemukakan bahwa “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Sementara menurut Abdullah (2015: 220) menjelaskan bahwa “metode deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan

sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dan bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis dan meneliti hasil penelitian berupa status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, suatu kelas peristiwa dan sifat sesuatu pada saat penelitian dilakukan untuk memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

B. Definisi Operasional dan atau Operasionalisasi Variabel

Jika ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Hatch dan Farhady (dalam Sugiyono, 2017: 38) “secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain”.

Selanjutnya Kerlinger (dalam Sugiyono, 2017: 39) menyatakan bahwa “variabel adalah konstruk (*constructs*) atau sifat yang akan dipelajari”.

Sementara Kidder (dalam Sugiyono, 2017: 39) menjelaskan bahwa “variabel adalah suatu kualitas (*qualities*) dimana peneliti mempelajari dan mencari kesimpulan darinya”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu konstruk, sifat, kualitas dan atribut seseorang atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas/variabel independen dan variabel terikat/variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2017: 39) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Administrasi menjelaskan bahwa “variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Selanjutnya masih menurut Sugiyono (2017: 40) menyatakan bahwa “variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Implementasi Kebijakan dengan notasi X, sedangkan variabel terikatnya adalah Partisipasi Masyarakat dengan notasi Y.

Untuk memperjelas variabel penelitian, penulis menjelaskan operasional variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

1. Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan adalah proses, tahapan dan tindakan melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau

swasta dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, dekrit presiden atau keluarnya standar peraturan yang berpengaruh terhadap aspek kehidupan masyarakat dan diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan lainnya yang telah digariskan dalam perumusan kebijakan.

2. Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan, keterlibatan dan tindakan secara mental dan emosional masyarakat untuk ambil bagian dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak lain dengan berkontribusi dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan materil (dana) dan pencurahan tenaga dengan maksud untuk berbagi tanggung jawab dalam mencapai tujuan kelompok dan usaha yang bersangkutan sehingga diperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

Variabel penelitian yang dioperasionalisasikan adalah variabel yang terkandung dalam hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini. Batas kajian dari hipotesis tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi oleh berbagai indikator yang merupakan ukuran dari setiap variabel penelitian. Untuk mempermudah pemahaman selanjutnya, maka peneliti menguraikan operasionalisasi variabel pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel X Implementasi Kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Edwards III (1980: 9-12)	1. Komunikasi	a. <i>Transmission</i> (Wahana sosialisasi)	1-3
		b. <i>Clarity</i> (Kejelasan)	4-5
		c. <i>Consistency</i> (Konsistensi)	6-7

	2. Sumber daya	a. Kemampuan implementor	8-10
		b. Sarana dan prasarana	11-12
		c. Dana	13-14
	3. Disposisi	a. Menolak	15
		b. Netral (Acuh)	16
		c. Mendukung	17-18
4. Struktur birokrasi	a. SOP	19	
	b. Fragmentasi (tersebar nya tanggung jawab kebijakan)	20	

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Y Partisipasi Masyarakat

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Cohen dan Uphof (dalam Riyanda, 2016: 36)	1. Partisipasi dalam perencanaan	a. Kehadiran rapat	1-2
		b. Ikut serta dalam penyusunan program pembangunan	3-4
		c. Ikut serta dalam penetapan program pembangunan	5-6
		d. Sumbangan pemikiran untuk pembangunan	7-8
	2. Partisipasi dalam pelaksanaan	a. Partisipasi dalam bentuk tenaga	9-11
		b. Partisipasi dalam bentuk uang	12
		c. Partisipasi dalam bentuk harta benda	13
	3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil	a. Ikut serta memanfaatkan program yang ditetapkan	14-15
		b. Ikut serta memanfaatkan hasil proyek yang dibangun	16-17
	4. Evaluasi	a. Penilaian dan pengawasan secara langsung	18-19
		b. Penilaian dan pengawasan secara tidak langsung	20

C. Populasi, Teknik Sampling, Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Dalam penelitian terdapat istilah populasi, populasi sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan subyek penelitian.

Menurut Sugiyono (2017: 90) menjelaskan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Selanjutnya Nazir (2005: 271) menyatakan bahwa “populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan”.

Sementara Margono (2004: 118) menjelaskan bahwa “populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah kumpulan data, individu, objek/subjek yang mempunyai kualitas, karakteristik dan ciri-ciri tertentu yang ditetapkan dan menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu penyelenggara dan peserta Musrenbang di Kecamatan Ganeas yang berjumlah 49 orang yang terdiri dari:

Tabel 3.3
Populasi Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Seksi PPM	3 orang
4.	Para Kepala UPTD/UPTB se-Kecamatan Ganeas	4 orang
5.	Para Kepala Desa se-Kecamatan Ganeas	8 orang
6.	Para Delegasi Desa se-Kecamatan Ganeas	24 orang
7.	Para Ketua BPD se-Kecamatan Ganeas	8 orang
Jumlah		49 orang

2. Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan aspek penting dalam penelitian, karena berguna untuk menentukan siapa saja anggota populasi yang hendak dijadikan sampel.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. (Sugiyono, 2017: 96)

3. Sampel Penelitian

Selain populasi dalam penelitian juga mengenal istilah sampel. Sampel secara singkat berarti contoh. Adapun pengertian sampel menurut para ahli antara lain sebagai berikut.

Menurut Sugiyono (2017: 91) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Arikunto (2002: 109) yang menyatakan bahwa “sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”.

Selanjutnya Margono (2004: 121) menjelaskan bahwa “sampel adalah sebagian dari populasi”.

Berdasarkan pendapat ketiga ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah bagian atau wakil dari jumlah dan karakteristik populasi yang akan diteliti.

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu penyelenggara dan peserta Musrenbang di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang yang berjumlah 49 orang, dengan menggunakan teknik sampling jenuh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian adalah kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur, baik itu buku-buku, dokumen dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, di antaranya melalui:
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau peristiwa dari aspek yang diteliti pada lokasi penelitian.

- b. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- c. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden.
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa catatan harian lapangan, peraturan daerah maupun peraturan bupati yang merupakan pelengkap hasil observasi, penyebaran angket dan wawancara.

Jenis angket yang digunakan penulis adalah angket tertutup dan terstruktur, artinya jawaban responden terhadap setiap pernyataan terikat pada alternatif jawaban yang disesuaikan dan responden tidak diberi kesempatan untuk memberikan jawaban lain selain jawaban yang disediakan.

Jenis angket yang diberikan kepada responden adalah jenis angket tertutup yaitu angket yang berisi pernyataan-pernyataan dengan disertai alternatif jawaban yang telah disediakan. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *likert* yang mengurutkan skor dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya. Hal tersebut seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Skala Likert

Alternatif Jawaban	Skor
Selalu	5
Sering	4
Kadang-kadang	3

Jarang	2
Tidak pernah	1

Sumber: Riduwan (2008: 87)

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Uji Validitas Instrumen

Untuk mengetahui sejauhmana data yang didapatkan melalui instrumen penelitian (dalam hal ini kuesioner) dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur maka dilakukan uji validitas instrumen.

Menurut Sudjana (2004: 12) menyatakan bahwa “validitas adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai”.

Selanjutnya Arikunto (2010: 211) menjelaskan bahwa “validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”.

Menurut Sugiyono (2017: 137) mengemukakan bahwa “instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid”.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa validitas adalah ketepatan ukuran, alat ukur atau alat penilaian yang digunakan untuk mengukur kesahihan atau kevalidan suatu konsep atau instrumen dengan menilai (mengukur) apa yang harus dinilai sehingga didapatkan data itu valid.

Untuk mengukur validitas instrumen menggunakan rumus korelasi product moment dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

n : jumlah sampel

x : skor butir soal

y : skor total

\sum : jumlah

a. Hasil Pengujian Validitas Variabel Implementasi Kebijakan

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran terhadap 20 item pernyataan dari indikator-indikator variabel Implementasi Kebijakan. Hasil angket yang terkumpul diberi skor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga diperoleh data tentang Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

Tabel 3.5
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Implementasi Kebijakan (X)

No. Resp	Item Pernyataan																				Total Skor	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	4	5	4	3	4	4	5	5	90
2	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	1	5	5	5	5	89
3	5	5	5	4	5	3	3	4	5	5	5	3	5	4	3	3	3	4	5	5	3	82
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	3	1	5	5	5	5	89
5	3	3	3	4	4	4	4	3	4	5	4	5	5	3	3	3	1	5	5	5	4	76
6	3	3	3	5	5	2	5	5	5	5	5	2	5	4	3	3	2	5	5	5	3	78
7	5	4	5	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	75
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	5	3	3	1	5	4	5	5	87
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	5	3	3	1	5	4	5	5	87

10	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	5	3	3	1	5	4	5	5	87
11	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	2	5	5	3	3	1	5	4	5	5	87
12	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	3	1	4	4	4	3	85
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	2	1	5	5	5	4	89
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	2	1	5	5	5	4	89
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	2	1	5	5	5	4	89
16	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	3	3	3	5	5	5	5	90
17	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	4	3	5	5	5	5	92
18	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	4	3	5	5	5	5	92
19	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	4	3	5	5	5	5	92
20	4	4	5	5	4	5	3	5	5	4	4	4	3	5	3	1	5	5	5	5	84
21	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	4	4	4	4	5	83
22	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	4	4	4	4	5	83
23	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	4	4	4	4	5	83
24	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	3	3	3	4	4	4	5	83	
25	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	72
26	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	5	4	1	5	4	5	5	76
27	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	2	3	62
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	79
29	5	5	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	88
30	3	3	3	4	5	4	4	4	5	5	3	4	3	2	4	3	5	5	5	3	77
31	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	3	3	5	5	5	5	94
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	98
33	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	2	4	3	3	4	2	4	4	5	5	80
34	4	4	3	5	5	4	4	5	4	5	4	3	3	3	2	3	4	4	5	4	78
35	4	4	4	2	5	5	3	2	4	5	3	3	3	2	2	2	4	4	5	5	71
36	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	78
37	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	76
38	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	76
39	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	76
40	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4	4	76
41	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	4	4	3	4	5	5	5	90
42	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	3	5	4	3	5	5	5	5	92
43	5	5	3	3	5	3	3	3	5	5	1	3	3	3	4	3	5	5	3	3	73
44	5	5	5	5	2	5	5	5	5	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	91
45	5	5	4	5	5	5	3	5	5	5	3	5	3	3	3	2	5	5	5	4	85
46	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	97
47	5	5	5	5	5	4	5	5	3	5	3	5	5	3	4	1	5	3	5	5	86
48	5	5	5	4	3	5	3	4	5	3	3	5	3	1	4	1	5	5	5	5	79

Sumber: Data Penelitian Hasil Olahan, 2021

Setelah data dimasukkan dalam tabel rekapitulasi jawaban responden variabel implementasi kebijakan, kemudian dibuat tabel penolong tiap item untuk keperluan uji validitas instrument yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.6
Analisis Item 1 Variabel Implementasi Kebijakan

No. Resp	X	Y	XY	X ²	Y ²
1	5	90	450	25	8100
2	5	89	445	25	7921
3	5	82	410	25	6724
4	5	89	445	25	7921
5	3	76	228	9	5776
6	3	78	234	9	6084
7	5	75	375	25	5625
8	5	87	435	25	7569
9	5	87	435	25	7569
10	5	87	435	25	7569
11	5	87	435	25	7569
12	5	85	425	25	7225
13	5	89	445	25	7921
14	5	89	445	25	7921
15	5	89	445	25	7921
16	5	90	450	25	8100
17	5	92	460	25	8464
18	5	92	460	25	8464
19	5	92	460	25	8464
20	4	84	336	16	7056
21	5	83	415	25	6889
22	5	83	415	25	6889
23	5	83	415	25	6889
24	5	83	415	25	6889
25	4	72	288	16	5184
26	4	76	304	16	5776
27	4	62	248	16	3844

28	4	79	316	16	6241
29	5	88	440	25	7744
30	3	77	231	9	5929
31	5	94	470	25	8836
32	5	98	490	25	9604
33	5	80	400	25	6400
34	4	78	312	16	6084
35	4	71	284	16	5041
36	4	78	312	16	6084
37	4	76	304	16	5776
38	4	76	304	16	5776
39	4	76	304	16	5776
40	4	76	304	16	5776
41	5	90	450	25	8100
42	5	92	460	25	8464
43	5	73	365	25	5329
44	5	91	455	25	8281
45	5	85	425	25	7225
46	5	97	485	25	9409
47	5	86	430	25	7396
48	5	79	395	25	6241
49	5	92	460	25	8464
Jumlah	227	4103	19149	1069	346299

Sumber: Data Penelitian Hasil Olahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari jumlah responden (n) = 49 diperoleh $\sum X = 227$, $\sum Y = 4103$, $\sum XY = 19149$, $\sum X^2 = 1069$, $\sum Y^2 = 346299$. Sehingga apabila hasil-hasil tersebut dimasukkan kedalam rumus koefisien korelasi *product moment* akan diperoleh hasil berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2] \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{49 \cdot 19149 - (227) \cdot (4103)}{\sqrt{[49 \cdot 1069 - (227)^2] \{49 \cdot 346299 - (4103)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{938301 - 931381}{\sqrt{[52381 - 51529] \{16968651 - 16834609\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{6920}{\sqrt{852.134042}}$$

$$xy = \frac{6920}{\sqrt{114203784}}$$

$$xy = \frac{6920}{10686}$$

$$xy = 0,648$$

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan uji validitas item nomor 1 pada Implementasi Kebijakan di atas dengan menggunakan rumus Korelasi *Product Moment* dapat diketahui bahwa r_{xy} atau $r_{hitung} \geq 0,3$ atau $0,648 \geq 0,30$ dan dapat dinyatakan valid sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisis.

Tabel 3.7
Hasil Validitas Implementasi Kebijakan

No.	Item	r_{hitung}	r_{kritis}	Validitas
1.	Item 1	0,648	0,3	Valid
2.	Item 2	0,683	0,3	Valid
3.	Item 3	0,425	0,3	Valid
4.	Item 4	0,450	0,3	Valid
5.	Item 5	0,486	0,3	Valid
6.	Item 6	0,660	0,3	Valid
7.	Item 7	0,796	0,3	Valid
8.	Item 8	0,450	0,3	Valid
9.	Item 9	0,475	0,3	Valid
10.	Item 10	0,486	0,3	Valid
11.	Item 11	0,392	0,3	Valid
12.	Item 12	0,708	0,3	Valid
13.	Item 13	0,398	0,3	Valid
14.	Item 14	0,342	0,3	Valid
15.	Item 15	0,285	0,3	Tidak Valid
16.	Item 16	0,333	0,3	Valid
17.	Item 17	0,555	0,3	Valid

18.	Item 18	0,475	0,3	Valid
19.	Item 19	0,630	0,3	Valid
20.	Item 20	0,561	0,3	Valid

Sumber: Data Penelitian Hasil Olahan, 2021

b. Hasil Pengujian Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran terhadap 20 item pernyataan dari indikator-indikator variabel Partisipasi Masyarakat. Hasil angket yang terkumpul diberi skor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga diperoleh data tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Partisipasi Masyarakat (Y)

No. Resp	Item Pernyataan																				Total Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	3	4	3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	87
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	98
3	5	4	4	4	4	4	5	5	3	3	4	3	3	5	5	5	5	4	4	4	83
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	1	92
5	4	3	3	4	3	4	3	4	5	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	80
6	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	5	5	5	4	4	4	81
7	3	3	4	4	4	5	4	4	3	3	3	3	2	4	4	4	4	5	5	5	76
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	93
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	93
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	93
11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	93
12	5	4	5	4	4	4	5	5	3	3	3	2	2	5	5	5	4	2	1	2	73
13	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5	5	5	4	5	5	3	88
14	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5	5	5	4	5	5	3	88
15	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	5	5	5	4	5	5	3	88
16	4	5	5	5	5	5	4	5	4	3	3	3	3	5	3	5	3	5	5	4	84
17	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	4	5	93
18	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	4	5	93

19	5	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5	5	5	5	5	4	5	91
20	5	4	3	5	5	4	5	5	5	5	4	3	3	4	5	5	5	5	4	4	88
21	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	89
22	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	89
23	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	89
24	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5	88
25	3	3	3	2	3	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	69
26	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	5	5	4	5	3	3	3	70
27	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	2	2	5	5	4	5	3	3	3	69
28	2	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	67
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80
30	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	5	4	4	74
31	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	97
32	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	5	95
33	5	4	3	4	4	4	3	5	5	4	4	3	2	5	4	4	4	4	4	4	79
34	5	5	4	4	5	4	4	5	5	3	3	3	2	4	4	4	4	5	5	5	83
35	5	4	4	5	4	5	4	5	3	3	3	3	1	4	4	5	5	5	3	5	80
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	2	4	4	4	4	3	3	75
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	2	4	4	4	4	3	3	75
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	2	4	4	4	4	3	3	75
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	2	4	4	4	4	3	3	75
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	2	2	4	4	4	4	3	3	75
41	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	3	3	5	5	5	5	4	4	5	90
42	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	5	5	4	4	5	4	4	89
43	3	3	3	5	3	5	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	3	3	3	70
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100
45	5	4	5	5	3	5	5	3	4	3	5	3	3	5	5	4	4	4	5	3	83
46	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	98
47	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	95
48	5	5	5	5	4	4	3	2	5	4	3	4	3	5	5	5	5	4	4	4	84
49	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	1	5	5	5	4	3	3	85

Sumber: Data Penelitian Hasil Olahan, 2021

Setelah data dimasukkan dalam tabel rekapitulasi jawaban responden variabel Partisipasi Masyarakat, kemudian dibuat tabel penolong tiap item untuk keperluan uji validitas instrument yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.9
Analisis Item 1 Variabel Partisipasi Masyarakat

No. Resp	X	Y	XY	X ²	Y ²
1	3	87	261	9	7569
2	5	98	490	25	9604
3	5	83	415	25	6889
4	5	92	460	25	8464
5	4	80	320	16	6400
6	4	81	324	16	6561
7	3	76	228	9	5776
8	5	93	465	25	8649
9	5	93	465	25	8649
10	5	93	465	25	8649
11	5	93	465	25	8649
12	5	73	365	25	5329
13	5	88	440	25	7744
14	5	88	440	25	7744
15	5	88	440	25	7744
16	4	84	336	16	7056
17	5	93	465	25	8649
18	5	93	465	25	8649
19	5	91	455	25	8281
20	5	88	440	25	7744
21	5	89	445	25	7921
22	5	89	445	25	7921
23	5	89	445	25	7921
24	5	88	440	25	7744
25	3	69	207	9	4761
26	4	70	280	16	4900
27	3	69	207	9	4761
28	2	67	134	4	4489
29	4	80	320	16	6400
30	3	74	222	9	5476
31	5	97	485	25	9409
32	5	95	475	25	9025
33	5	79	395	25	6241
34	5	83	415	25	6889
35	5	80	400	25	6400

36	4	75	300	16	5625
37	4	75	300	16	5625
38	4	75	300	16	5625
39	4	75	300	16	5625
40	4	75	300	16	5625
41	5	90	450	25	8100
42	5	89	445	25	7921
43	3	70	210	9	4900
44	5	100	500	25	10000
45	5	83	415	25	6889
46	5	98	490	25	9604
47	5	95	475	25	9025
48	5	84	420	25	7056
49	5	85	425	25	7225
Jumlah	220	4142	18849	1018	353902

Sumber: Data Penelitian Hasil Olahraga, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari jumlah responden (n) = 49 diperoleh $\sum X = 220$, $\sum Y = 4142$, $\sum XY = 18849$, $\sum X^2 = 1018$, $\sum Y^2 = 353902$. Sehingga apabila hasil-hasil tersebut dimasukkan kedalam rumus koefisien korelasi *product moment* akan diperoleh hasil berikut.

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \cdot \sum x^2 - (\sum x)^2][n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{49 \cdot 18849 - (220) \cdot (4142)}{\sqrt{[49 \cdot 1018 - (220)^2][49 \cdot 353902 - (4142)^2]}}$$

$$r_{xy} = \frac{923601 - 911240}{\sqrt{[49882 - 48400][17341198 - 17156164]}}$$

$$r_{xy} = \frac{12361}{\sqrt{1482 \cdot 185034}}$$

$$r_{xy} = \frac{12361}{\sqrt{274220388}}$$

$$r_{xy} = \frac{12361}{16559}$$

$$r_{xy} = 0,746$$

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan uji validitas item nomor 1 pada Partisipasi Masyarakat di atas dengan menggunakan rumus Korelasi *Product Moment* dapat diketahui bahwa r_{xy} atau $r_{hitung} \geq 0,3$ atau $0,746 \geq 0,30$ dan dapat dinyatakan valid sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisis.

Tabel 3.10
Hasil Validitas Partisipasi Masyarakat

No.	Item	r_{hitung}	r_{kritis}	Validitas
1.	Item 1	0,746	0,3	Valid
2.	Item 2	0,756	0,3	Valid
3.	Item 3	0,611	0,3	Valid
4.	Item 4	0,635	0,3	Valid
5.	Item 5	0,811	0,3	Valid
6.	Item 6	0,680	0,3	Valid
7.	Item 7	0,744	0,3	Valid
8.	Item 8	0,538	0,3	Valid
9.	Item 9	0,454	0,3	Valid
10.	Item 10	0,455	0,3	Valid
11.	Item 11	0,466	0,3	Valid
12.	Item 12	0,550	0,3	Valid
13.	Item 13	0,518	0,3	Valid
14.	Item 14	0,440	0,3	Valid
15.	Item 15	0,468	0,3	Valid
16.	Item 16	0,541	0,3	Valid
17.	Item 17	0,595	0,3	Valid
18.	Item 18	0,687	0,3	Valid
19.	Item 19	0,587	0,3	Valid
20.	Item 20	0,545	0,3	Valid

Sumber: Data Penelitian Hasil Olahan, 2021

2. Uji Reliabilitas Instrumen

Untuk mengetahui tingkat keajegan variabel Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan variabel Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang maka dilakukan pengukuran terhadap item pernyataan dari indikator-indikator variabel Implementasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat.

Uji reliabilitas instrumen merupakan pengujian instrumen penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut memiliki kestabilan dan konsistensi sehingga bisa digunakan kembali untuk penelitian pada waktu yang berbeda maka hasilnya akan tetap sama.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25 dengan teknik uji *Alfa Cronbach*. Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian reliabel atau tidak. Berikut adalah rumus uji reliabilitas :

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

(Arikunto, 2013: 239)

Keterangan :

r_{11} : reliabilitas instrument

k : banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$: jumlah varians butir

σ_1^2 : varians total

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya data tersebut diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengkodean Data

Angket yang telah disebarakan kepada responden diberi kode angket secara beruntun dengan maksud memudahkan peneliti dalam pengecekan pada setiap pengambilan angket yang diterima.

b. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses pemeriksaan jawaban terhadap seluruh angket yang terkumpul. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaklengkapan data yang telah diperoleh dari hasil angket.

c. Skoring Data

Skoring data merupakan proses menyiapkan beberapa alternatif jawaban untuk menjawab setiap pernyataan yang diajukan kepada responden sebagai berikut:

- 1) Alternatif jawaban Selalu diberi skor 5
- 2) Alternatif jawaban Sering diberi skor 4
- 3) Alternatif jawaban Kadang-kadang diberi skor 3
- 4) Alternatif jawaban Jarang diberi skor 2
- 5) Alternatif jawaban Tidak pernah diberi skor 1

Alternatif jawaban tersebut didasarkan pada *skala Likert* yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. (Riduwan, 2008: 87)

2. Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Perhitungan Prosentase

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengujian hipotesis melalui perhitungan prosentase dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan skor ideal, yaitu jumlah pertanyaan \times jumlah responden \times skor tertinggi.
- 2) Setelah skor ideal di ketahui, langkah selanjutnya melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

b. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh mempunyai distribusi normal, dalam penelitian ini peneliti mengujinya dengan menggunakan rumus *Kolmogorof Smirnof*.

Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Susunlah data dari yang terkecil ke yang terbesar

- 2) Susunlah frekuensi nilai yang sama
- 3) Cari probabilitas kumulatif normal (F_t)
- 4) Cari probabilitas kumulatif empiris (F_s)
- 5) Cari nilai $Z = \frac{X_i - \bar{X}}{S}$

Keterangan :

X_i = angka pada data

\bar{X} = rata-rata

S = simpangan baku

- 6) Hitung nilai $|F_t - F_s|$
 - 7) Bandingkan nilai terbesar $|F_t - F_s|$ dengan nilai tabel *Kolmogorof Smirnof*
 - 8) Syarat :

tolak H_0	:	$D_{\max} \leq D_{\text{tabel}}$
terima H_a	:	$D_{\max} > D_{\text{tabel}}$
- α : 0,05

c. Uji Koefisien Korelasi

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, maka dapat dilakukan dengan cara mencari koefisien korelasi namun item tidak valid tidak diikutsertakan dalam analisis kedua variabel tersebut.

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus *Pearson Product Moment* yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} : koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

n : jumlah sampel

x : skor butir soal

y : skor total

\sum : jumlah

d. Uji Signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk mengetahui apakah korelasi tersebut signifikan atau tidak, sehingga untuk mencari atau menguji apakah pengaruh tersebut berlaku untuk semua populasi atau tidak maka dilakukan uji t, sehingga dapat diketahui harga t_{hitung} dan harga t_{tabel} , yang selanjutnya dibandingkan dan diperoleh gambaran mengenai posisi hipotesis penelitian apakah H_o atau H_a yang diterima.

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2015: 184)

Keterangan :

t = tingkat signifikansi

r = nilai koefisien korelasi

n = banyaknya anggota populasi

Tingkat signifikan yang digunakan untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) nilai t yang didapat kemudian dibandingkan dengan nilai t dalam tabel dengan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

$t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

$t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

e. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian Koefisien Determinasi dimaksudkan untuk mengetahui derajat keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan pendapat Arikunto untuk mencari Nilai Koefisien Determinasi (derajat keterkaitan) variabel, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd : Koefisien Determinasi

r^2 : Kuadrat Koefisien Korelasi Variabel Bebas dan Variabel Terikat

G. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2020 sampai tanggal 17 Juli 2021 dengan jadwal penelitian sebagai berikut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan prosentase diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Musrenbang di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang mencapai 84,64%.
2. Berdasarkan perhitungan prosentase dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang mencapai 84,53%.
3. Terdapat Hubungan antara Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang yang berada pada tingkat korelasi sangat kuat dengan koefisien korelasi sebesar 0,819.
4. Terdapat Pengaruh Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dengan koefisien determinasi sebesar 0,671 atau jika dipersentasekan sebesar 67,1%. Ini

menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berpengaruh kuat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang.

B. Saran

Setelah penulis membahas mengenai Implementasi Kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan sikap implementor Musrenbang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang agar lebih bertanggung jawab, peduli dan mengikuti mekanisme dalam pelaksanaan Musrenbang dengan lebih baik melalui proses pengawasan yang lebih ketat, sehingga kegiatan-kegiatan yang semestinya tidak terjadi dapat dihindari.
2. Sebaiknya setiap penyampaian usulan dalam Musrenbang dilengkapi dengan media presentasi. Hal tersebut dibutuhkan untuk meminimalisasi perdebatan karena dengan media presentasi peserta dapat memasukkan teks, gambar, grafik, video dan audio kedalam lembar kerjanya sehingga akan membantu mendukung poin-poin usulan yang hendak disampaikan.
3. Perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam bentuk tenaga, swadaya pendanaan maupun harta benda, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat sepenuhnya

mendapat dukungan masyarakat dan tidak memicu konflik karena sikap resistensi (penolakan) dari masyarakat.

4. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek atau sasaran daripada pembangunan tetapi juga dijadikan sebagai subjek pembangunan yang terlibat dalam setiap tahapan atau proses pembangunan, hal tersebut karena masyarakatlah yang paling memahami potensi, kondisi dan apa yang dibutuhkan daerahnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Abdoellah, Awan Y dan Rusfiana, Yudi. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Akadun. 2019. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, Sahya. 2018. *Ekologi Administrasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Bahua, Mohammad, Iqbal. 2018. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Fathoni, A., Sulaeman, A., & Kusmayadi, D. (2020). PENGARUH PERENCANAAN OPERASI PENANGGAPAN DARURAT BENCANA TERHADAP EFEKTIVITAS KERJA KASU KEDARURATAN DAN LOGISTIK BPBD SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(1), 79-91. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/71>
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca.
- Hasibuan, S.P. Malayu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: UNG Press.
- Muhammad, Arni. 2011. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*. UNPAD Press.

- Priyono. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Analisa Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2020. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tawai, Adrian dan Yusuf, Muh. 2017. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Kendari: Literacy Institute.
- Wijaya, Candra dan Muhammad, Rifa'i. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Zaenal, Mukarom dan Muhibudin, Wijaya L. 2018. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- JURNAL:**
- Akadun. 2011. *Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan. 27(2), 185.
- Haq, Muhammad, Izzul. 2016. *Quo Vadis Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) Sleman*. Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama. 16 (2), 90.
- Riyanda, Riko. 2016. *Peran Partisipatif Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sitokok-Kota Batam*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 4(1), 36.

DOKUMENTASI:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

